

SKRIPSI

STUDI TENTANG PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI

DESA LONG BERINI KECAMATAN BAHAU HULU

KABUPATEN MALINAU KALIMANTAN UTARA



OLEH :

SEPTEPANUST USAT LASAU
NPM : 2063201079

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2025

SKRIPSI
STUDI TENTANG PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA LONG BERINI KECAMATAN BAHAU HULU
KABUPATEN MALINAU KALIMANTAN UTARA



OLEH :

SEPTEPANUST USAT LASAU
NPM : 2063201079

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara

Nama Mahasiswa : Septeanust Usat Lasau

Npm : 2063201079

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

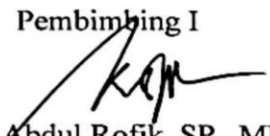
Program Studi : Administrasi Publik

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

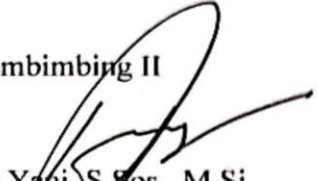
Samarinda, 14 Juni 2025

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
NIDN. 1116.117.001

Pembimbing II


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIDN. 1106.118.701

Mengetahui,


Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
NIK. 2023.070.826

Penguji :

1. Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
3. Firdayanti Ayu Nurinda, S.IP., M.A.B

1. .....

2. .....

3. .....

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septepanust Usat Lasau
NPM : 2063201079
Judul Skripsi : Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Septepanust Usat Lasau
NPM. 2063201079

RINGKASAN

SEPTEPANUST USAT LASAU, Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, untuk menjelaskan temuan dengan menggunakan teknik analisis data intraktif dari Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, yang dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu sebagai dinamisator, fasilitator, mediator, dan motivator. Sebagai dinamisator, LPM berfungsi sebagai penggerak untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan. Sebagai fasilitator, LPM bertugas memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan melalui penyediaan sarana, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta pendampingan. Sebagai mediator LPM berperan dalam penyelesaian konflik serta sosialisasi kegiatan pemberdayaan. Sebagai motivator, LPM juga bertugas untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dan kreatif dalam berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. LPM di Desa Long Berini belum menjalankan peranannya dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti koordinasi, pengawasan, dan peningkatan kapasitas LPM. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini meliputi partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah, kerja sama antar lembaga, budaya gotong royong, serta inovasi dalam program pemberdayaan. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya, koordinasi yang kurang efektif, serta rendahnya kapasitas anggota LPM.

Kata Kunci : Peran LPM, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Long Berini.

RIWAYAT HIDUP



SEPTEPANUST USAT LASAU, lahir pada tanggal 29 September 2001 di Long Berini, adalah anak dari Bapak Lasau Salu dan Ibu Roslin Lian yang merupakan putra ke 2 dari 4 bersaudara. Peneliti memulai pendidikan pada tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri 003 Bahau Hulu lulus tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bahau Hulu hingga lulus tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Malinau dan lulus pada tahun 2020

Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Samarinda yaitu Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata Satu (S1) melalui tes yang diadakan oleh pihak Universitas. Kemudian pada tahun 2023 tepatnya bulan Agustus peneliti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang ditempatkan di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala nama-Nya yang agung, yang menjaga, dan melindungi serta memelihara seluruh ciptaan-Nya, Atas berkat, rahmat dan petunjuk-Nya pula peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., MT selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Kaprodi Administrasi Publik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan ide-ide, baik secara teknis secara konseptual yang sangat bermanfaat dan berharga sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Firdayanti Ayu Nurinda, S.IP., M.A.B selaku Dosen Penguji Ahli yang telah memberikan koreksi dan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam perbaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat selama peneliti mengikuti perkuliahan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
7. Tidak terlepas seluruh staf Program Studi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, staf Akademik, staf Kemahasiswaan dan Tata Usaha serta staf Perpustakaan atas bantuan dan kemudahannya demi kelancaran penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Orang Tua tercinta Bapak Lasau Salu dan Ibu Roslin Lian, telah merawat dan membesarkan saya, membantu dalam segi moril dan materil serta doa yang tak pernah putus.
9. Kepada Saudara-saudara tercinta saya Wendie Apui Lasau, Pariel Irang Lasau, dan Victor Immanuel Kole Lasau yang selalu mendukung peneliti selama ini awal perkuliahan hingga rampungnya skripsi ini.
10. Sahabat dan Saudara tercinta Novelson Lusi, Jaui Njuk, Kule Bilung, Samir Desandro Lukas dan Jiu Li yang selalu membantu atau menemani peneliti,

serta Teman-teman prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2020 yang tidak bisa disebut namanya satu per satu.

11. Terakhir, kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi setiap aktivitas yang dilakukan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan semua pihak yang terkait. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan.

Samarinda, 14 Juni 2025



Septepanust Usat Lasau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
RINGKASAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORI.....	13
2.1. Teori dan Konsep	13
2.1.1. Peran	15
2.1.2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	15
2.1.3. Pemberdayaan	24
2.1.4. Masyarakat.....	25
2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat	26
2.1.6. Desa	31
2.1.7. Pemerintah Desa	32
2.2. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jadwal Penelitian	39

3.2. Jenis Penelitian.....	40
3.3. Lokasi Penelitian.....	41
3.4. Definisi Konseptual.....	42
3.5. Fokus Penelitian.....	43
3.6. Sumber Data.....	45
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.8. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.1.1. Keadaan Kependudukan	56
4.1.2. Sejarah Desa	59
4.1.3. Visi dan Misi Desa Long Berini	60
4.1.4. Visi dan Misi LPM Desa Long Berini	62
4.1.5. Program Kerja LPM Desa Long Berini	62
4.1.6. Keadaan Sumber Daya Manusia.....	64
4.1.7. Sarana Fasilitas Umum dan Sarana Fasilitas Sosial	65
4.2. Penyajian Data Hasil Penelitian	66
4.2.1. Peran LPM Dalam Pemberdayaan Masyarakat	66
4.2.1.1. Peran Sebagai Dinamisator	67
4.2.1.2. Peran Sebagai Fasilitator	76
4.2.1.3. Peran Sebagai Mediator.....	84
4.2.1.4. Peran Sebagai Motivator	93
4.2.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	102
4.2.2.1. Faktor Pendukung.....	102
4.2.2.2. Faktor Penghambat.....	103
4.3. Pembahasan.....	103
4.3.1. Peran LPM Dalam Pemberdayaan Masyarakat	103

4.3.1.1. Peran Sebagai Dinamisator	105
4.3.1.2. Peran Sebagai Fasilitator	107
4.3.1.3. Peran Sebagai Mediator.....	111
4.3.1.4. Peran Sebagai Motivator	115
4.3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	118
4.3.1.1. Faktor Pendukung.....	118
4.3.1.2. Faktor Penghambat.....	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	123
5.1. Kesimpulan	123
5.2. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 4.1. Batas Wilayah Desa Long Berini.....	56
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	57
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	58
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencharian	59
Tabel 4.6. Program Kerja LPM Desa Long Berini	63
Tabel 4.7. Aparatur Desa Long Berini	65
Tabel 4.8. Sarana dan Prasarana	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	38
Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya dalam mensejahterakan masyarakat desa perlu adanya peran dari pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam proses mewujudkan harapan tersebut pemerintah telah merancang peraturan yang mengamanatkan agar setiap desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah dalam merancang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mempunyai peran dan fungsi untuk mewedahi, memotivasi serta mengajak masyarakat desa dalam membangun desa untuk kepentingan bersama, serta mendorong masyarakat untuk menjadi berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah desa atau adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam rangka perwujudan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan dan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19, kewenangan tersebut meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul,
2. Kewenangan lokal berskala desa,
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan kewenangan pemerintah tersebut, desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang biasanya disebut dengan otonomi desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa saat ini telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dan kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Alasan tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan sehingga sebagian besar penduduknya tinggal di desa. Oleh karena itu, desa merupakan faktor kekuatan utama sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk membantu pemerintah desa melaksanakan pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Selain itu, lembaga kemasyarakatan ini adalah lembaga atau wadah yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah mufakat sebagai mitra desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pemberdayaan merupakan langkah penting yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejahtera berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan serta kesehatan. Sejahtera secara batin berarti seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Pemberdayaan pada intinya adalah

memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain, memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera.

Perhatian pemerintah terhadap desa dibuktikan dengan salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita yang ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Untuk itu, pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong program pembangunan di tingkat desa, agar mampu mengelola potensinya secara mandiri.

Berdasarkan situs resmi Kalimantan Utara, Kalimantan Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara pulau kalimantan. Pulau ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor yang juga sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Saat ini Kalimantan Utara menjadi Provinsi termuda di Indonesia yang resmi disahkan menjadi Provinsi pada Tanggal 16 November 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah 75.467.70 km².

Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan

109 Desa, Kabupaten ini terluas di Kalimantan Utara dengan luas wilayah 40.088,38 km². Secara geografis, wilayah Kabupaten Malinau berada di daerah tropis dengan posisi geografis 1⁰21'36"-4⁰10'55" Lintang Utara dan 114⁰35'22"-116⁰50'55" Bujur Timur.

Kecamatan Bahau Hulu adalah salah satu dari 6 Kecamatan di Kabupaten Malinau, Kecamatan Bahau Hulu ini terdiri dari 6 Desa yaitu salah satu di antaranya Desa Long Berini. Desa ini dihuni oleh penduduk asli suku Dayak Kenyah yang masih memegang erat adat istiadat, budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Desa Long Berini terletak di ujung Utara Kecamatan Bahau Hulu, terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 227 jiwa, yang terdiri dari 136 laki-laki dan 91 perempuan dengan 53 Kepala Keluarga (KK).

Desa Long Berini adalah salah satu desa yang masih mempertahankan ciri khas dan adat istiadat budayanya yang sudah terkenal akan tarian tradisionalnya sehingga potensi ini sangat besar bagi perkembangan sektor pariwisata terutama budaya. Selain seni tari, Desa Long Berini juga memiliki cagar budaya berupa Kuburan Batu. Kuburan Batu ini merupakan peninggalan nenek moyang suku Dayak dan hampir sebagian besar terdapat di pinggir sungai. Kuburan Batu ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda.

Desa Long Berini juga mengembangkan dan mengelola potensi desa melalui pembentukan beberapa unit usaha yang mengelola Pengelolaan Perkebunan Kopi dan Wisata Desa yaitu dibantu oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Salah satu Produk unggulan dari Desa Long Berini ini dikenal

dengan Kopi Berini, proses pengelolaannya terbilang masih mengikuti metode tradisional yang melestarikan keaslian rasa kopi dan cita rasa yang khas. Petani kopi di Desa Long Berini sering kali bersuaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam budidaya kopi agar memastikan bahwa ekosistem sekitarnya tetap terjaga. Perkebunan kopi yang menghasilkan produk kopi khas dari Desa Berini yang dikemas dan dijadikan sebagai produk unggulan dari Desa Long Berini yang disebut dengan Kopi Berini dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan wisata desa berupa Wisata Kuburan Batu yang harus dilestariakan untuk menarik perhatian wisatawan. Masyarakat di Desa Long Berini sebagian besar yang bekerja sebagai petani dan ada juga yang berprofesi sebagai guru dan perawat. Dari sebagian bekerja banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap atau tidak bekerja, sehingga banyak dari sebagian masyarakat dewasa memanfaatkan hutan dan alam sebagai mata pencahariannya yaitu, berburu atau mengumpulkan hasil hutan seperti gaharu.

Pada proses memberdayakan masyarakat di Desa Long Berini, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sangat penting dalam mewujudkan aspirasi dan mewadahi masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa di Desa Long Berini, terdapat permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Desa Long

Berini, dan kurangnya koordinasi antar sesama anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat maupun dengan aparat setempat yang menyebabkan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prioritas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang baik dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat jika Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat di Desa Long Berini dengan judul penelitian yang akan dilakukan **“Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan keluar masalahnya. Dengan kata lain, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti oleh peneliti dan di dasarkan atas identifikasi masalah dan pembahasan masalah. Seperti pendapat para ahli di bawah ini :

Menurut Sugiyono (2015:228) “Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan”.

Ketika menyusun sebuah rumusan masalah harus memperhatikan teknik perumusan masalah.

Selanjutnya menurut Sudarwan Danin dikutip oleh Uhar Suhar Saputra (2014:190) “Perumusan masalah adalah pada apa masalah itu, sedangkan pertanyaan penelitian lebih teknis sifatnya, yaitu mengacu pada tujuan penelitian yang sama”.

Sedangkan menurut Licoln dan Guba dikutip oleh Sugiyono (2015:210) “Rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwarumusan masalah adalah pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan, serta pada apa masalah itu, dan merupakan fokus penelitian yang bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan.

Maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui dan teliti melalui penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dan menjawab tujuan yang ingin dicapai dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Menurut Fathur Sani K (2016:11) “Tujuan penelitian adalah suatu ungkapan peneliti mengenai apa yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, di mana isi dari tujuan peneliti ini mengacu pada rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya”. Tujuan penelitian ada 2 jenis, yaitu :

1. Tujuan umum

Tujuan umum merupakan gambaran luaran yang ingin dicapai secara global dan digunakan untuk jangka panjang.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus merupakan uraian dari variabel yang akan diukur dalam waktu tertentu. Di mana pada dasarnya tujuan khusus merupakan hasil dari penjabaran yang sudah ada pada tujuan umum.

Menurut Ranjit Kumar (2016:40) “Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan hasil akhir yang diharapkan dari penelitian, termasuk menguji teori, menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah tertentu”.

Menurut Yanuar Ikbar (2014:131) “Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu, atau ingin mencari pemecahan masalah tertentu, dan ingin segala sesuatu yang hendak diinginkan”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, tujuan penelitian merupakan ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan, kalimat yang menunjukan indikasi

ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian, dan mencari pemecahan masalah tertentu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan serta merupakan uraian yang menunjukkan bahwa suatu masalah layak untuk diteliti.

Menurut Sugiyono (2015:15) “Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis. Penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya”.

Menurut Rachmat Trijono (2015:15) “Manfaat penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang sesuatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi”.

Selanjutnya menurut Kadji (2016:7) mengemukakan deskripsi manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan keilmuan (aspek teoritis)

Ekspansi faktual yang telah teruji secara empirik itu dapat memberikan sumbangan kepada teori-teori, baik menambah maupun menetapkan.

2. Bagi aspek guna laksana (secara praktis)

Teori atau fakta yang telah teruji itu mempunyai manfaat praktis dalam hal ekspansi, sedemikian rupa daya diagnosis bagi terapi lebih langsung dari deskripsi, terutama yang nilai informasinya tinggi.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, pada dasarnya mempunyai manfaat tertentu, demikian pula dengan penelitian ini diantaranya mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi oleh konsep ilmiah khususnya mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi empiris berdasarkan pijakan teori yang mendukung terhadap peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Kabupaten Malinau.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa manfaat penelitian adalah penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis, serta merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah, dan mempunyai manfaat yang penting bagi peneliti untuk menambah wawasan berpikir.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Teori dan Konsep

Teori merupakan prinsip umum yang kredibel secara ilmiah yang menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan konsep merupakan gagasan umum atau pemahaman tentang sesuatu.

Menurut Sugiyono (2016:81) menyatakan “Teori adalah alur atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*predication*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala”.

Menurut Wiliam Wiersm (dalam Sugiyono, 2020:78) “Teori adalah generalisasi atau sekumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis”. Sedangkan menurut Harbani Pasolong (2020:90) “Teori merupakan seperangkat proporsi yang terdiri atas konstruk-konstruk yang terdefinisikan dengan saling berhubungan”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, proposisi yang disusun secara sistematis, sekumpulan generalisasi, dan seperangkat proporsi yang terdiri atas konstruk-konstruk yang saling berhubungan.

Menurut Cooper dan Emory dalam kutipan Muslich dan Sri Iswati (2017:80) “Konsep dapat diartikan sebagai sejumlah pengertian atau ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal yang sejenis. Konsep-

konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Kita mengabstraksikan pengertian-pengertian demikian dan memakai kata-kata sebagai label untuk menandai pengertian-pengertian tersebut”.

Menurut Amiruddin (2019:42) “Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu”. Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (dalam Rachmat Trijono, 2015:18) menyatakan bahwa “Konsep dipakai oleh penelitian untuk menggambarkan abstrak suatu gejala ilmiah. Konsep juga dapat disebut dengan generalisasi dari sekelompok gejala tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai gejala yang sama”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri yang berkaitan dengan objek, kondisi, situasi, kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari suatu gejala, dan merupakan sekelompok gejala tertentu yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan berbagai gejala tertentu.

Dari uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa teori dan konsep merupakan seperangkat konsep, definisi, proposisi yang disusun secara sistematis, sekumpulan generalisasi, dan seperangkat proporsi yang terdiri atas konstruk-konstruk yang saling berhubungan. Merupakan sejumlah pengertian atau ciri yang berkaitan dengan objek, kondisi, situasi, kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari suatu gejala, dan merupakan sekelompok gejala tertentu yang dipakai untuk menggambarkan berbagai gejala tertentu.

2.1.1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Lepa dkk (2019:2) “Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di mana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan”.

Menurut Kurnia (2019:42) “Peran adalah sebagai wujud nyata tingkah laku seseorang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi panutan masyarakat”. Sedangkan menurut Bambang Ismanto (2022:1) “Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang karena status sosialnya, baik bersifat formal maupun informal”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan, tingkah laku seseorang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat, dan diharapkan dari seseorang karena status sosialnya, baik bersifat formal maupun informal.

2.1.2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan

mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat serta kebutuhan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan.

Menurut Yasmil Anwar dan Adang (2019:198) berpendapat secara sosiologis, istilah “Lembaga dapat diartikan sebagai suatu format yang mantap, stabil, terstruktur, dan mapan (*established*). Dalam pengertian ini lembaga sebagai suatu jaringan sarana hidup berisi peranan yang menjalankan fungsi masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang”.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko (2015:217) “Pemberdayaan pada dasarnya ditunjukan untuk tercapainya perubahan-perubahan perilaku masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu hidup yang mencakup banyak aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, ideologi, politik maupun pertahanan dan keamanan”.

Selanjutnya menurut Purwaningsih (2020:41) menyatakan bahwa “Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis dan dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama”.

Secara umum lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisasi, terkendali dan dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Lembaga umumnya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek

keorganisasian, dalam aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai-nilai moral dan peraturan-peraturan yang berbeda dalam masyarakat. Sedangkan dalam sudut pandang organisasi lebih menekankan pada aspek struktural dan mekanisme dalam mencapai tujuan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) menjelaskan “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan, maka ia menjalankan suatu peranan”. Terdapat beberapa indikator peran yaitu sebagai berikut :

1. Peran sebagai dinamisator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai dinamisator adalah mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menempatkan dirinya di tengah masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam bidang pemberdayaan yang dibuat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Maka dari itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu melakukan pendampingan serta memberikan solusi di setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2. Peran sebagai fasilitator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator yang dimaksud adalah mampu memfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan bidang pembangunan yang diperuntukkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga harus mampu mendampingi dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan

peningkatan keterampilan masyarakat agar program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Peran sebagai mediator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mediator adalah untuk mensosialisasikan beberapa hasil usulan dari realisasi pemberdayaan masyarakat desa yang telah ditetapkan dan dijadikan rancangan, melakukan sosialisasi kegiatan seperti pihak-pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Peran sebagai motivator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai motivator adalah dapat mendorong masyarakat desa untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kreativitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Motivator dipandang sebagai pemimpin dan pelopor pembangunan, sehingga tantangannya adalah menciptakan motivator pemberdayaan masyarakat. Banyak hal yang harus dipersiapkan, antara lain persiapan ketahanan pribadi, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosial, kemampuan mengajak, menggerakkan, menjembatani dan kemampuan menjadi fasilitator. Jadi, peran motivator sangat penting dan strategis. Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi tempat memfokuskan upaya masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, serta merupakan

wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 94 menjelaskan :

1. Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Kemudian diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pasal 6 menjelaskan :

1. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;

- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dalam Pasal 8 menjelaskan :

1. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
4. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

5. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat 26 menyebutkan “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang ikut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dalam Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 133 menjelaskan :

1. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :
 - a. Mendorong dan berperan aktif dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. Menciptakan suasana kondusif dan harmonis dalam hubungan kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pemerintahan serta Lembaga Masyarakat;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah serta memberikan masukan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak-pihak lain;

- e. Memfasilitasi untuk menyelenggarakan forum musrenbangdes dalam menentukan program pembangunan yang menjadi prioritas dalam setiap tahun anggaran;
 - f. Memanfaatkan sumber daya kelmebagaan untuk pembangunan.
2. Uraian tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :
- a. Ketua :
 - 1. Melakukan tugas sebagai pimpinan, memberikan petunjuk, melaksanakan koordinasi kedalam dan keluar, memberikan arahan koordinasi kebijakan program, sebagai kebijakan;
 - 2. Dalam tugaskan ketua dibantu wakil ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 3. Secara khusus mengkoordinasi bidang usaha, sosial, serta kelembagaan dan kemitraan.
 - b. Wakil Ketua :
 - 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas;
 - 2. Mengkoordinasikan bidang lingkungan dan teknologi informatika.
 - c. Sekretaris :
 - 1. Mengkoordinir ketatausahaan, melakukan fungsi kesekretariatan, koordinasi pembinaan teknis administrasi;
 - 2. Melakukan pengelolaan pelaporan administrasi dan pengendalian keuangan;

3. Menyusun jadwal pertemuan rutin, berkala atau insidental berdasarkan kebutuhan.
- d. Wakil sekretaris :
 1. Membantu sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program.
 - e. Bendahara :
 1. Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan, menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur, dan melaporkan keadaan keuangan dalam rapat pengurus;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara dibantu wakil bendahara dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - f. Wakil bendahara :
 1. Membantu bendahara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.
3. Bidang-bidang :
 - a. Bidang usaha, mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK);
 - b. Bidang sosial, memfasilitasi peningkatan kegiatan sosial, kependidikan dan keterampilan masyarakat untuk lebih berdayaguna;
 - c. Bidang lingkungan, meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan mendorong pembangunan yang berwawasan partisipatif dengan mengedepankan aspek kesehatan lingkungan;

- d. Bidang kelembagaan dan kemitraan :
 - 1. Memperkuat kelembagaan dan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai pilar pembangunan partisipatif di masyarakat;
 - 2. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan sumber daya dan dana.
 - e. Bidang teknologi dan informasi, melakukan dan melaksanakan teknologi informatika melalui telecenter kecamatan dan atau kota menyangkut penyampaian informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.
4. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :
- a. Membina kerjasama antar lembaga untuk pembangunan;
 - b. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral;
 - c. Mengusahakan tumbuh dan berkembangnya kesadaran kritis masyarakat akan manfaat pembangunan;
 - d. Meningkatkan kualitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pengembangan sumber daya manusia bagi pembangunan.

2.1.3. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses dan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, serta suatu upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama.

Menurut Sumarni (2020:72) “Pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan kekuatan masyarakat dalam mengelola potensi diri mereka, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik, untuk mencapai kesejahteraan bersama”.

Menurut Lilis Karwati (2017:45-46) “Pemberdayaan adalah salah satu wadah yang dijadikan sebagai upaya melibatkan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan warga belajar berupa pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat”.

Sedangkan menurut Mangun (2016:45) “Pemberdayaan adalah proses yang memberikan kemampuan dan kesempatan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi diri mereka secara optimal dalam menghadapi tantangan hidup yang ada”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses meningkatkan kekuatan masyarakat dalam mengelola potensi diri mereka, dan menjadi salah satu wadah sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar, serta memberikan kemampuan dan kesempatan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk memanfaatkan potensi diri mereka secara optimal.

2.1.4. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Secara umum, masyarakat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan.

Menurut Soekanto (2018:105) “Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi, berhubungan satu sama lain, dan berbagi pola-pola kehidupan serta budaya yang sama dalam suatu sistem sosial yang terorganisir”.

Menurut Giddens (2017:84) “Masyarakat adalah jaringan relasi yang terbentuk dari interaksi antara individu-individu yang memiliki kesamaan budaya dan sistem sosial yang mengikat mereka untuk hidup bersama. Masyarakat terbentuk dari struktur sosial yang mencakup lembaga-lembaga sosial, norma, dan budaya”.

Sedangkan menurut Kriyantono (2015:98) “Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah geografis yang sama dan memiliki sistem nilai serta norma sosial yang saling mengatur interaksi mereka. Mereka saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan struktur sosial”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi, jaringan relasi yang terbentuk dari interaksi antar individu-individu yang memiliki kesamaan budaya dan sistem sosial yang mengikat mereka untuk hidup bersama, serta memiliki sistem nilai dan norma sosial yang mengatur interaksi mereka.

2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial yang mengungkapkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, ikut serta, kerja sama, dan proses belajar yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pasal 126 Ayat (1) menjelaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Kemudian diperkuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Eko Sudarmanto dkk (2020:21) “Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya”.

Menurut Mujtaba (2018:134) “Pemberdayaan masyarakat adalah proses sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok

dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memperbaiki kualitas hidup mereka”.

Selanjutnya menurut Adisasmito (2014:149) “Pemberdayaan masyarakat dikonsepsikan sebagai suatu usaha untuk memberikan kekuatan, tenaga, kemampuan, mempunyai akal atau cara untuk mengatasi masalah dalam kehidupan masyarakat”.

Pemberdayaan dikonsepsikan dalam dua pokok, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan kemampuan yang diharapkan.
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat warga golongan tertentu yang adadalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan, proses sosial yaitu untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk memperbaiki kualitas hidup, serta sebagai suatu usaha memberikan kekuatan, tenaga, kemampuan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan masyarakat.

Ada beberapa unsur pokok dalam pemberdayaan masyarakat menurut Adisasmito (2014:154), yaitu :

1. Aksesibilitas informasi

Aksesibilitas informasi ini sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Informasi disini sebagai kekuatan yang berksaitan dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas sehingga akses dalam mendapatkan informasi sebagai unsur penting untuk mewujudkan masyarakat mandiri.

2. Keterlibatan dan partisipasi

Dalam proses pemberdayaan keterlibatan dan partisipasi sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan.

3. Akuntabilitas

Kaitanya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan dengan mengatasnamakan rakyat.

4. Kapasitas organisasi lokal

Kaitanya dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisasi masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Selanjutnya menurut Adisasmito (2014:155-156) dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa strategi pemberdayaan, yaitu :

1. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat

Salah satu langkah awal dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat adalah dengan mendukung posisi tawar dan akses masyarakat untuk

memperoleh dan memanfaatkan input sumber daya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat.

2. Mengembangkan kapasitas masyarakat

Dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi, sehingga dapat memperluas kerjasama dan mendirikan pendapatan yang layak, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu dan masyarakat miskin.

3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial

Dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti halnya masyarakat yang terkena musibah bencana alam dan masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi.

4. Mengurangi berbagai bentuk pengaturan dalam masyarakat

Dengan mengurangi berbagai bentuk pengaturan yang menghambat masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapat, melakukan interaksi sosial untuk membangun kesepakatan antara kelompok masyarakat dengan organisasi sosial politik.

5. Membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat

Dengan membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui pengembangan forum lintas yang dibangun dan dimiliki masyarakat setempat.

6. Mengembangkan potensi masyarakat

Dengan mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat ditingkat lokal untuk memperkuat solidaritas masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, kemasyarakatan dan khususnya membantu masyarakat miskin dan rentan sosial.

2.1.6. Desa

Asal kata “Desa” dari bahasa India yaitu “*Swadesi*” berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur, yang menunjuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Antropolog Koentjaraningrat (2021:102) “Desa adalah kesatuan sosial yang memiliki budaya dan sistem nilai tersendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan ekonomi masyarakat setempat”.

Selanjutnya Menurut Antropolog Selo Soemardjan (2021:15) “Desa adalah suatu komunitas yang berdasarkan kekeluargaan dan adat istiadat, di mana kehidupan masyarakatnya masih sederhana dan mata pencaharian utama adalah di sektor pertanian”.

Selanjutnya Menurut Sosiolog Edi Suharto (2020:47) “Desa adalah unit administrasi terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat”.

Selanjutnya Menurut Ekonom Bambang Bojonegoro (2019:23) “Desa merupakan wilayah administrasi yang memiliki potensi ekonomi yang berbasis

pada sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal, yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dari segi pemerintahan, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang tentu saja diakui dalam sistem pemerintahan daerah”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa desa adalah kesatuan sosial yang memiliki budaya dan sistem nilai tersendiri, komunitas yang berdasarkan kekeluargaan dan adat istiadat, merupakan unit administrasi terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta wilayah administrasi yang memiliki potensi ekonomi pada sumber daya alam dan sumber manusia lokal, yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.7. Pemerintahan Desa

Konsep pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi :

1. Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48, Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya

diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kedudukan Desa tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 dan Pasal 5, yaitu “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika”. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 2 berbunyi bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 4 berbunyi bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam pasal 6 menyebutkan pemerintahan desa menjalankan fungsi :

1. Manajemen pemerintahan
2. Manajemen pembangunan
3. Manajemen pelayanan.

Menurut Hidayat (2020:68) “Pemerintah desa adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun keuangan desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal dan kearifan lokal”.

Menurut Wibowo (2018:102) “Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

Selanjutnya menurut Sutedi (2017:81) “Pemerintah desa adalah institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di desa yang dipimpinnya”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah desa adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun keuangan desa, lembaga pemerintahan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan di tingkat desa.

2.2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah, dan membantu peneliti untuk mengatur pemikiran, mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, dan mengarahkan proses analisis secara sistematis.

Menurut Nawawi (2018:85) “Kerangka pikir adalah model yang digunakan untuk memandu penelitian dengan menunjukan hubungan antar variabel yang akan dianalisis. Kerangka pikir membantu peneliti untuk

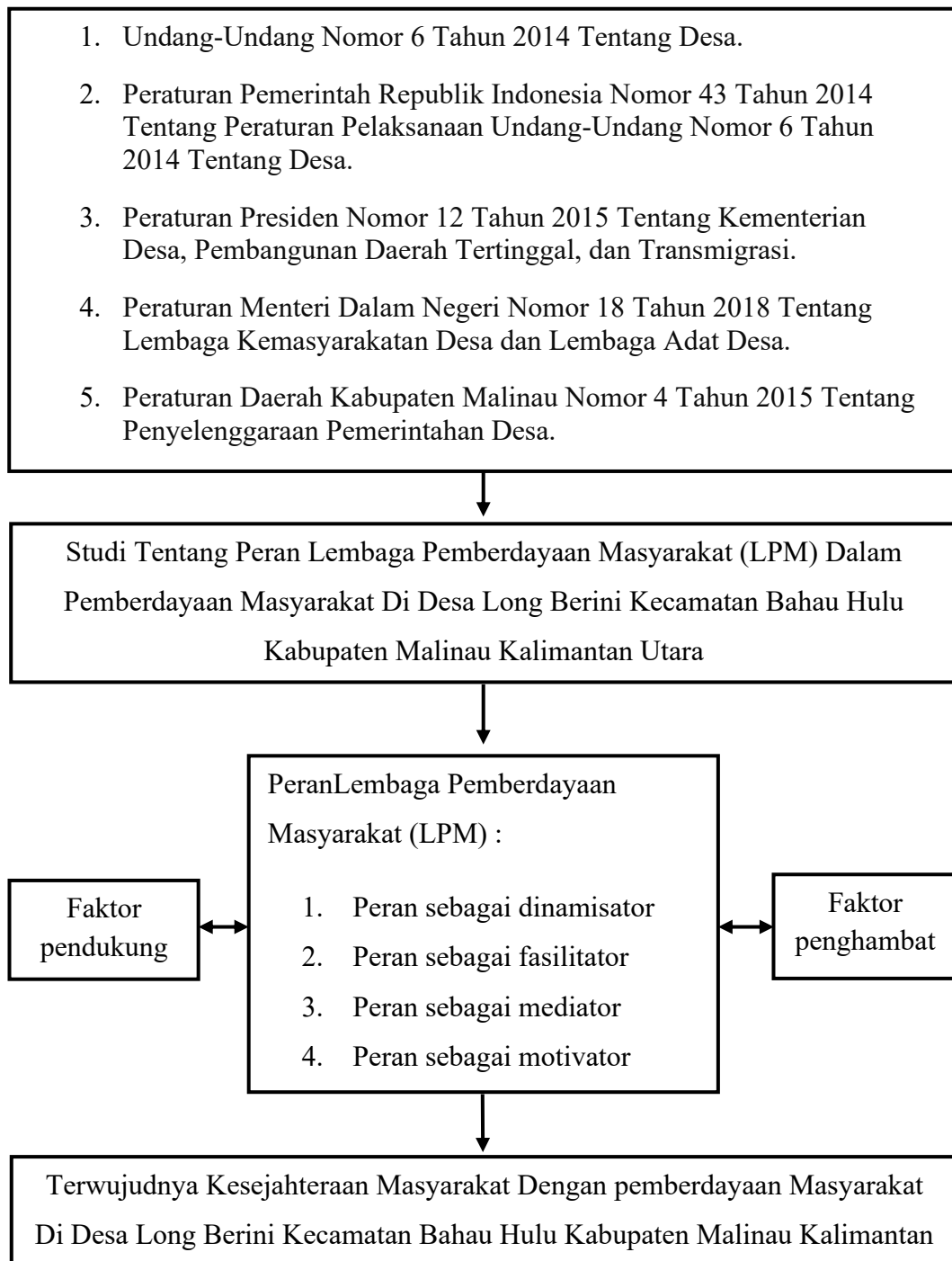
memfokuskan penelitian pada aspek-aspek tertentu yang relevan dan memastikan konsistensi dalam analisis dan interpretasi data”.

Menurut Sugiyono (2016:76) “Kerangka pikir adalah gambaran atau model yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Kerangka pikir ini sangat penting untuk memetakan hipotesis atau teori yang akan diuji dalam penelitian, serta untuk memandu alur penelitian agar lebih terstruktur”.

Selanjutnya menurut Creswell (2014:69-71) “Kerangka pikir adalah gambaran teoritis yang menunjukkan variabel-variabel yang akan diteliti dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kerangka pikir bertindak sebagai dasar yang menghubungkan teori dan hipotesis dalam penelitian, membantu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian dan tujuan yang jelas”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa kerangka pikir adalah model yang digunakan untuk memandu penelitian, gambaran teoritis yang menunjukkan hubungan antar variabel-variabel, dan sebagai dasar yang menghubungkan teori dan hipotesis dalam penelitian.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : disusun oleh peneliti, 2024/2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian merupakan alat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah proyek penelitian. Sebagai panduan waktu, jadwal ini membantu peneliti mengatur tahapan-tahapan kegiatan, memonitor kemajuan, dan memastikan bahwa penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2021:73) “Waktu penelitian adalah tanggal, bulan, dan tahun, di mana penelitian dilakukan”. Sedangkan menurut Sugiyono (2019:382) “Mengungkapkan bahwa setiap penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan”.

Kemudian menurut Pohan dalam Andi Prastowo (2016:287) “Jadwal penelitian adalah salah satu komponen dalam proposal penelitian yang berisi waktu dan kegiatan selama penelitian, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jadwal penelitian merupakan suatu tahapan-tahapan yang jelas dan kongkrit dalam proses kegiatan.

Rancangan penelitian atau hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

NO	Keterangan	Jadwal Penelitian					
		Tahun 2024/2025					
		Okt	Nov	Des	Jan	Mei	Juni
1	Observasi						
2	Pengajuan Judul						
3	Penyusunan Skripsi						
4	Penelitian Lapangan						
5	Seminar Hasil						
6	Ujian Pendadaran						

Sumber : disusun oleh peneliti 2024/2025.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2015:15) “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada sifat *positivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrument kunci”. Sedangkan menurut Lexy J.Moleong (2017:9) “Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen”.

Sedangkan metodologi penelitian kualitatif menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono 2018:3) merupakan penelitian yang berkenaan

dengan data yang bukan bersifat angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan data yang diperoleh bukan bersifat angka tetapi bersifat naratif.

Berdasarkan uraian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang diteliti dalam penelitian ini yaitu, Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

3.3. Lokasi Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan seorang peneliti akan menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif dan tempat dimana peneliti memperoleh informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

Menurut V.Wiratma Sujarweni (2021:73) “Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan”. Sedangkan Menurut Lexy J. Moleong (2018:127) “Menjelaskan bahwa dalam memilih suatu lokasi penelitian diarahkan oleh suatu teori secara empiris yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk data yang bersifat sementara”.

Selanjutnya menurut Djam'an Satori Aan Komariah (2014:38) "Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan agar penelitian kualitatif ini hanya mengambil satu lokasi penelitian".

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan, diarahkan oleh suatu teori secara empiris, dan merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan.

Adapun lokasi penelitian yang peneliti tetapkan adalah di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan yaitu Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

3.4. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah definisi guna menjelaskan konsep dengan kata-kata, serta merupakan suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian.

Menurut David Silverman (2017:40) "Definisi konsepsional adalah penjelasan mendalam tentang suatu konsep yang mencakup aspek-aspek teoritis dan kontekstual, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana konsep tersebut digunakan dalam penelitian".

Selanjutnya menurut Ulber Silalahi (2018:118) secara sederhana "Definisi konsepsional atau teoritis dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep dengan konsep-konsep lain". Sedangkan menurut Adi S. (2020:27)

mengatakan bahwa “Konsepsional adalah konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti”.

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh para ahli di atas, definisi konsepsional merupakan gambaran yang dibentuk oleh peneliti tentang subjek penelitian terhadap fenomena atau kejadian yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian yang berjudul “Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara”, definisi konsepsionalnya adalah pemahaman tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

3.5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Menurut Lexy J Moleong (2015:97) “Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan kepustakasaan lainnya”. Sedangkan menurut Sugiyono (2019:275) “Dalam pandangan kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan observasi dan pertanyaan atau yang disebut dengan penjelajah umum”.

Selanjutnya menurut Spradley yang dikutip Sugiyono (2019:275) “Fokus itu merupakan dominan tunggal beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial.

Dalam penelitian kualitatif penentu fokus dalam proposal lebih didasari pada tingkat baru informasi yang akan diperoleh dari hasil sosial”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan fokus penelitian adalah masalah pokok bersumber dari pengalaman peneliti yang diperoleh setelah melakukan observasi, dan merupakan informasi baru yang akan diperoleh dari hasil sosial. Sebuah cara untuk membatasi studi ruang lingkup yang mempermudah penelitian dalam mengambil dan mengelola data. Fokus penelitian ini sangat penting dijadikan sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti meneliti Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, Maka fokus dalam penelitian ini sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Long Berini :
 - a. Peran sebagai dinamisator
 - b. Peran sebagai fasilitator
 - c. Peran sebagai mediator
 - d. Peran sebagai motivator
2. Faktor pendukung dan penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

3.6. Sumber Data

Sumber data adalah lokasi asal data yang digunakan. Sumber data dapat menjadi lokasi awal tempat data lahir atau tempat informasi fisik pertama kali didapatkan, serta merupakan informasi yang diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

Menurut Lofland Lofland (dalam Ibrahim 2018:67) “Sumber data adalah memilih sumber data kepada utama dan tambahan. Sumber data menurutnya adalah semua bentuk kata-kata dan tindakan. Sedangkan sumber data tambahan adalah berupa dokumen tertulis, foto rekaman dan lain-lain”.

Selanjutnya menurut Satori (dalam Ibrahim 2018:67) “Sumber data bisa berupa benda, orang, maupun nilai, atau pihak yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial dalam objek material penelitian (sumber informasi)”. Sedangkan menurut Sugiyono (2015:132) “Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sumber data dalam penelitian adalah dapat berupa orang, benda, objek yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

3.6.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari sumber pertama atau asli, dan merupakan data yang diperoleh dengan beberapa cara yaitu, kuesioner, wawancara, atau survei.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2021:73) “Data primer data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga

data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sedangkan menurut Edi Riadi (2016:48) “Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama.”

Selanjutnya menurut Nanang Martono (2015:65) mengungkapkan bahwa “Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informasi melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sebenarnya setiap hari kita mendapatkan data primer yang sangat banyak, suara yang kita dengar, pemandangan yang kita lihat, selera atau kondisi, dan situasi yang kita rasakan, merupakan data primer yang terus merangsang indra kita”.

Dari penjelasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa sumber data utama adalah orang yang bisa memberikan informasi, fakta dan data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan melalui kuesioner, kelompok fokus, panel maupun hasil wawancara, informasi diperoleh langsung dari sumber pertama, dan langsung dari lokasi penelitian. Jika penelitian terkait dengan peristiwa, maka sumber data utamanya adalah orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut. Adapun sumber data yakni :

1. *Key Informant*, menggunakan *Purposive Sumpling*. Menurut Sugiyono (2014:281) “*Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Di mana teknik ini digunakan atas dasar pertimbangan-

pertimbangan bahwa *Key Informant* lebih menguasai apa yang diinginkan peneliti”.

2. *Informant*, menggunakan *Purposive Sampling* yaitu seorang yang mengetahui serta memberikan informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti dan *Accidental Sampling*. Menurut Sugiyono (2014:85) “*Accidental Sampling* adalah teknik penentu sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data”.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sili	Kepala Desa	<i>Key Informant</i>
2	Ariyanto Irang	Ketua LPM	<i>Informant</i>
3	Lenjau Lian	Sekretaris LPM	<i>Informant</i>
4	Daniel Ngau	Ketua BPD	<i>Informant</i>
5	Agustiarti Lian	Ketua PKK	<i>Informant</i>
6	Hendri Jalung	Ketua Karang Taruna	<i>Informant</i>
7	Daniel Jalung	Kaur Pembangunan	<i>Informant</i>
8	Pamilia Irang	Ketua RT 1	<i>Informant</i>
9	Udau Jalung	Ketua RT 2	<i>Informant</i>
10	Ulau Lawing	Masyarakat	<i>Informant</i>
11	Jangin Salu	Masyarakat	<i>Informant</i>

3.6.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan, serta merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:193) “Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sedangkan menurut Bugin (dalam Ibrahim 2018:70) “Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto”. Selanjutnya menurut Sanusi (2014:104) “Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung, dan dapat berupa jurnal ilmiah, laporan-laporan dan arsip organisasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini yakni profil Desa Long Berini, data sensus penduduk, data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, di antaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan riset. Dalam pengerjaannya dapat menggunakan metode pengamatan, dokumentasi, angket, wawancara, hingga tes atau pengujian.

Menurut Elvinaro Ardianto, (2019:161) “Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik bagaimana data itu bisa ditemukan, digali, dikumpulkan, dikategorikan dan dianalisis. Sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Menurut Ibrahim (2018:74) “Mengumpulkan data adalah suatu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian”. Sedangkan Menurut Sugiyono (2015:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner dan dokumentasi”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara bagaimana data itu bisa ditemukan, digali, dikumpulkan, dikategorikan, serta dianalisis. Mengumpulkan data sangat penting dan merupakan langkah paling strategis dalam penelitian.

Untuk mengumpul data yang diperlukan bagi penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a) Tinjauan Pustaka (*Libray Research*) yaitu menggunakan fasilitas perpustakaan untuk memperoleh teori yang dapat mendukung penulisan skripsi ini dan membaca literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- b) Penelitian Lapangan (*Field Work Reserch*) yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian di mana dalam tahap ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut :

3.7.1. Observasi

Observasi merupakan suatucara memperoleh data dengan melakukan pengamatan pada masalah yang akan diteliti secara langsung dilapangan dengan tujuan membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.

Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2018:309) mengatakan bahwa “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”.

Menurut Widoyoko (2014:46) “Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:145) “Observasi adalah suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, berdasarkan data,

pengamatan dan pencatatan secara sistematis, serta merupakan suatu proses yang kompleks.

3.7.2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung kepada *informant* melalui tanya jawab antar peneliti. Menurut Sugiyono (2017:231) “Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Menurut Moleong (2016:186) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban”.

Sedangkan menurut Yusuf (2014:372) “Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa wawancara merupakan pertemuan atau percakapan dua orang untuk bertukar informasi dan ide, serta komunikasi secara langsung mengenai objek yang diteliti oleh pewawancara dengan sumber informasi.

3.7.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan dan metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

subjek atau oleh orang lain. Serta menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.

Menurut Fenti Hikamawati (2019:84) “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”. Sedangkan menurut Sudaryono (2019:229) “Dokumentasi adalah ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan dokumen lain yang mendukung penelitian”.

Sedangkan menurut Sujarweni (2014:33) “Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang memanfaatkan berbagai bahan dokumentasi, seperti surat, catatan harian, asrip foto hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dokumentasi adalah catatan peristiwa, meliputi buku-buku, laporan kegiatan, dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian.

3.8. Analisis Data

Analisis data adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, serta merupakan proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan

Masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

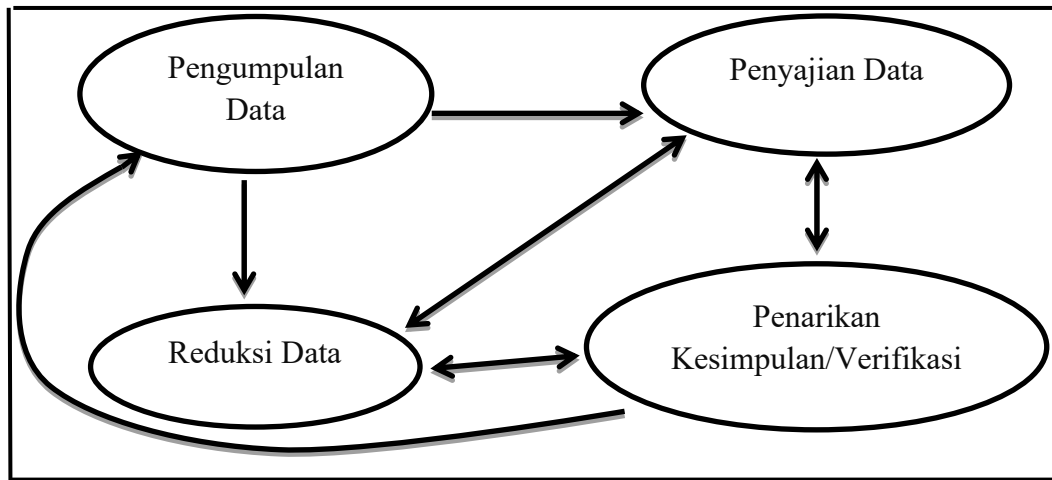
Menurut Elvinaro Ardianto, (2019:199) “Analisis data hasil penelitian adalah interpretasi atau penafsiran terhadap data yang sudah diperoleh di lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian yang sudah teruji keasliannya”.

Menurut Patton (dalam Ibrahim, 2018:105) mengatakan bahwa “Analisis data kualitatif suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian”.

Penelitian ini menerapkan Model Analisis Interaktif (*Interactive Model Of Analysis*) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:134) “Menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, dengan memastikan data telah terpenuhi secara menyeluruh”.

Dengan menggunakan analisis data kualitatif, berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:134) yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Matthew, B.Milles dan A.Humberman (dalam sugiyono 2017:134).

3.8.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam lapangan terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan relatif. Catatan deskriptif adalah sebagai data alami, yaitu catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapatan dan tafsiran dari penelitian tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran penelitian tentang fenomena yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

3.8.2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul dan kemudian memilih data yang relevan dan

bermakna, memfokuskan pada persoalan untuk memecahkan masalah, penemuan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian menyederhanakan, menyusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang penting tentang hasil, temuan serta maknanya.

3.8.3. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan mempertajam temuan tersebut.

3.8.4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama proses penelitian berlangsung yang sebelumnya dilakukan penyajian data. Setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya ditarik kesimpulan sementara, dan setelah data yang dibutuhkan benar-benar lengkap maka ditarik kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini, peneliti menyajikan data hasil yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, yaitu mempelajari data-data dan arsip yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memberikan gambaran umum mengenai data-data Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Berdasarkan profil Desa Long Berini, Desa Long Berini memiliki luas sebesar 8.104,23 Ha dengan memiliki batas desa sebagai berikut :

Tabel 4.1. Batas Wilayah Desa Long Berini

No	Wilayah	Berbatasan Dengan
1	Utara	Desa Apau Ping, Kecamatan Bahau Hulu
2	Timur	Desa Long Titi, Kecamatan Sungai Tubu
3	Selatan	Desa Long Kemuat, Kecamatan Bahau Hulu
4	Barat	Desa Long Banga (Serawak, Malaysia)

Sumber Data : Profil Desa Long Berini 2025.

4.1.1. Keadaan Kependudukan

Penduduk merujuk pada seseorang yang tinggal di suatu wilayah geografi atau membentuk populasi dalam konteks demografi. Penduduk dapat didefinisikan lebih lanjut sebagai individu-individu yang tinggal dan menetap di suatu tempat untuk jangka waktu tertentu, baik secara sementara maupun permanen.

Berikut adalah jumlah penduduk Desa Long Berini berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang peneliti peroleh berdasarkan data monografis Desa Long Berini :

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jensi Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	136
2	Perempuan	91
	Jumlah	227

Sumber Data : Pemerintah Desa Long Berini 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 136 jiwa, perempuan sebanyak 91 jiwa, dari semua jumlah keseluruhan di Desa Long Berini sebanyak 227 jiwa.

Kemudian peneliti akan menyajikan data tentang jumlah penduduk Desa Long Berini berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut. Sebagaimana pengkajiannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Long Berini Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Protestan	221
2	Katolik	6
3	Islam	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
	Jumlah	227

Sumber Data : Pemerintah Desa Long Berini 2025.

Berdasarkan agama atau kepercayaan, jumlah penduduk Desa Long Berini mayoritas beragama Kristen Protestan dengan jumlah 221 jiwa dan Katolik sebanyak 6 jiwa.

Selanjutnya peneliti menyajikan data mengenai jumlah penduduk Desa Long Berini berdasarkan tingkat pendidikan yang telah atau sudah ditempuh. Data ini memberikan informasi tentang distribusi penduduk desa dalam berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah hingga pendidikan tinggi. Jumlah penduduk Desa Long Berini berdasarkan pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Sedang Ditempuh

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	TK/Kelompok Bermain	8
2	SD/Sederajat	17
3	SLTP/Sederajat	20
4	SLTA/Sederajat	12
5	D-1	4
6	D-4	1
7	S-1	13
	Jumlah	75

Sumber Data : Pemerintah Desa Long Berini 2025.

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas penduduk Desa Long Berini berada pada jenjang pendidikan SLTP/Sederajat dan SD/Sederajat dan total penduduk dengan pendidikan yang sedang ditempuh tercatat sebanyak 75 jiwa.

Selanjutnya peneliti menyajikan data penduduk Desa Long Berini berdasarkan mata pencaharian. Dengan kata lain, tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai jenis pekerjaan atau aktivitas utama yang

dilakukan oleh penduduk Desa Long Berini. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencharian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencharian

No	Mata Pencharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	138
2	Pegawai Negeri Sipil	5
3	Perawat	1
4	Buruh Harian Lepas	28
5	Karyawan Swasta	1
6	Honoror	5
7	Guru	4
8	Perangkat Desa	23
9	Mengurus Rumah Tangga	22
	Jumlah	227

Sumber Data : Pemerintah Desa Long Berini 2025.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Long Berini berdasarkan mata pencharian, dapat disimpulkan memiliki berbagai jenis pekerjaan yang berbeda dengan jumlah keseluruhan sebanyak 227 jiwa.

4.1.2. Sejarah Desa

Menurut sejarah, Desa Long Berini mulanya bernama Desa Long Aking dan berada jauh dari letak desa yang ada saat ini. Tepatnya pada tahun 2004 yang mana saat itu Desa Long Aking Masih berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Bulungan sebelum terjadinya pemekaran.

Seiring dengan jalannya waktu, dari tahun ke tahun atau masa ke masa, telah yang ke tujuh kalinya Kepala Desa yang memimpin Desa Long Berini sampai yang ada sekarang ini, menurut jalanya kepemimpinan yang pertama

kalinya menurut cerita dan sejarah Desa Long Berini, Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut :

1. Njok Ngau, masa bakti 1930–1944, Asal pindahan dari Kampung Long Abang, pindah ke Kampung Nda Arit, pindah lagi ke Desa Long Berini.
2. Ingan Njok, masa bakti 1944–1964
3. Laway Lian, masa bakti 1964–1977
4. Irang Laway, masa bakti 1977–2004
5. Irang Bilung, masa bakti tahun 2006–2011
6. Antonius Lawai, masa bakti tahun 2011-2023, (2 Periode)
7. Sili, masa bakti tahun 2023–2029

Dengan terbentuknya Kecamatan Bahau Hulu atau pemekaran Kecamatan Bahau Hulu yaitu pada tahun 2006, bertempat di Desa Long Alango Kabupaten Malinau, Hingga saat ini, perkembangan Pemerintahan Desa Long Berini telah menuju pembenahan. Jumlah Rukun Tetangga (RT) hingga saat ini 2 (Dua) RT. Jumlah penduduk per Desember 2024 mencapai 227 orang, yang terdiri dari penduduk jenis kelamin laki-laki 136 jiwa, jenis kelamin perempuan 91 jiwa dan jumlah kepala keluarga 53 KK. Secara keseluruhan dan terperinci tentang Desa Long Berini terurai dalam paparan selanjutnya.

4.1.3. Visi dan Misi Desa Long Berini

4.1.3.1. Visi

“Mewujudkan Desa Long Berini Menjadi Desa Yang Maju Dengan Meningkatkan Kualitas SDM di Bidang Pertanian, dan Infrastruktur”

4.1.3.2. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Masyarakat Desa Long Berini Bidang Sumber Daya Manusia Melalui Peran aktif Lembaga Desa
2. Meningkatkan peran serta Masyarakat Desa Long Berini dan memperdayakan Masyarakat secara adil, jujur dan transparan
3. Meningkatkan Kualitan dan Kuantitas Pembangunan Desa Long Berini Bidang Infrastruktur serta Perekonomian Masyarakat Pemerataan yang bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan.
4. Meningkatkan dan mengelolah Pendapatan Asli Desa
5. Meningkatkan Peran Masyarakat Kelompok Tani, dan Tanaman pangan perekonomian Desa.
6. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh Etnis,suku,ras dan agama dan sikap toleransi.
7. Mewujudkan Efektifitas dan Ifisiensi Pengguna Sumber Daya Manusia dengan peran aktif pemuda dan perempuan dalam mengembangkan Sumber Daya Alam, Pariwisata Desa, dalam dimensi Desa Long Berini Konservasi.
8. Mewujudkan Supremasi Hukum Serta Menciptakan Pemerintah Desa Long Berini yang Bersih, dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintah Desa Long Berini Tegas, Tepat dan Transparan.

4.1.4. Visi dan Misi LPM Desa Long Berini

4.1.4.1. Visi

“Mewujudkan Masyarakat Desa Long Berini Yang Mandiri, Berdaya dan Berbudaya”

4.1.4.2. Misi

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
4. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.
5. Mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.
7. Menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

4.1.5. Program Kerja LPM Desa Long Berini

Berikut ini merupakan program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Long Berini yang mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, dan mengelola potensi daya lokal. Program ini mencakup bidang-bidang seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur.

Tabel 4.6. Jenis Program Kerja LPM Desa Long Berini

No	Jenis Program	Kegiatan	Ralisasi Pencapaian	Waktu Pelaksanaan
1	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan keterampilan mengelola sumber daya lokal, dan sosialisasi kepada masyarakat	80%	Januari s/d September 2024
2	Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan	Penyusunan rencana pembangunan partisipatif dan pengelolaan sampah masyarakat	90%	Januari s/d September 2024
3	Pendidikan dan Kesehatan	Pelatihan dan bimbingan tentang pendidikan, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat	0%	Januari s/d September 2024
4	Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan peningkatan kapasitas LPM dalam penyusunan perencanaan, pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan dan pemberdayaan	0%	Januari s/d September 2024

Sumber Data : Kantor Desa Long Berini 2024/2025.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat peneliti simpulkan program-program yang menunjukkan pencapaian dari kegiatan yang telah terlaksana dan belum terlaksana, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat (80%), program ini berhasil memenuhi kegiatan pelatihan pengelolaan sumber daya lokal masyarakat, yang dapat dilihat dari sosialisasi dan pelatihan pengelolaan hasil perkebunan yang

berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil perkebunan.

2. Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan (90%), program ini berhasil memenuhi kegiatan penyusunan rencana pembangunan partisipatif dan pengelolaan sampah masyarakat, yang dapat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sampah yang baik.
3. Pendidikan dan Kesehatan (0%), program ini belum berhasil dijalankan dari kegiatan pelatihan dan bimbingan tentang pendidikan, serta penyuluhan kesehatan yang belum terlaksana.
4. Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (0%), program ini belum berhasil dijalankan dari kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LPM dalam penyusunan perencanaan, pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

4.1.6. Keadaan Sumber Daya Manusia

Berikut ini peneliti menyajikan data keadaan sumber daya manusia aparatur Desa di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, menurut tingkat pendidikan yang sedang ditempuh dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7. Aparatur Desa Long Berini (Periode 2024-2029)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Sili	Kepala Desa	SMA
2	Rim Bilung	Sekretaris Desa	SMA
3	Merang Bilung S.Pd	Kepala Urusan Keuangan	S1
4	Daniel Jalung	Kepala Urusan Pembangunan	SMP
5	Usat Jalung	Tata Usaha Umum	SMP
6	Herman Ajang S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan	S1
7	Daniel Ngau	Ketua BPD	SMP
8	Ariyanto Irang	Ketua LPM	SMA
9	Pamilia Irang	Ketua RT 1	SMA
10	Udau Jalung	Ketua RT 2	SMP
11	Irang Lawai	Ketua Lembaga Adat	SD

Sumber Data : Kantor Desa Long Berini 2025.

Aparatur Desa Long Berini memiliki tingkat pendidikan yang di mulai dari SD/Sederajat hingga S-1 dengan mayoritas lulusan SMA dan SMP. Meskipun ada keterbatasan dalam pendidikan formal di beberapa posisi, aparatur desa tetap berjalan dan berfungsi dalam mengelola pemerintahan desa.

4.1.7. Sarana Fasilitas Umum dan Sarana Fasilitas Sosial

Berikut ini peneliti menyajikan sarana fasilitas dan sarana fasilitas sosial di Desa Long Berini, pemerintah telah menyediakan berbagai macam sarana umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8. Sarana dan Prasarana

No	Nama Bangunan	Jumlah (Unit)
1	Kantor Desa	1
2	Balai Pertemuan Umum	1
3	Pos Pelayanan Terpadu	1
4	Gedung SD	1
5	Gedung TK	1
6	Gereja	2

Sumber : Kantor Desa Long Berini 2025.

4.2. Penyajian Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan mengenai Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian. Penyajian data ini berdasarkan teori Soerjono Soekanto (2002:243), sebagai berikut :

4.2.1. Peran LPM Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini

Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berperan sebagai mitra pemerinthan desa dalam menggerakan, memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. LPM mendorong

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan aktif dalam pembangunan lokal.

4.2.1.1. Peran Sebagai Dinamisor

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai dinamisor adalah mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menempatkan dirinya di tengah masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam bidang pemberdayaan yang dibuat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Maka dari itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu melakukan pendampingan serta memberikan solusi disetiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk mendapatkan jawaban yang tepat guna mendukung penelitian ini, maka yang pertama peneliti memberikan pertanyaan kepada *Key Informant*. Menurut Bapak apakah anggota lembaga pemberdayaan masyarakat hadir dalam setiap rapat kegiatan pemberdayaan yang diadakan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “Ya, seharusnya anggota LPM selalu hadir dalam setiap rapat untuk memastikan program berjalan dengan baik. Jika berhalangan, koordinasi tetap dilakukan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Untuk memastikan hal tersebut peneliti kemudian melakukan wawancara kepada *Informant* dengan memberikan pertanyaan. Menurut Bapak apakah anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat hadir dalam setiap rapat kegiatan pemberdayaan yang diadakan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

Informant Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Ya, kami selalu berusaha hadir dalam setiap rapat kegiatan pemberdayaan untuk memastikan program berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini sebagai *Informant* beliau mengatakan :

“Secara ideal, anggota LPM diharapkan hadir dalam setiap rapat kegiatan pemberdayaan. Namun, kehadiran mereka bisa bervariasi tergantung pada agenda rapat, kesibukan, dan faktor lainnya. Kami terus berupaya meningkatkan partisipasi agar setiap program berjalan efektif.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini beliau mengatakan :

“Kehadiran anggota LPM dalam setiap rapat pemberdayaan sangat penting, namun tergantung pada agenda dan koordinasi dengan pemerintah desa. Idealnya, mereka selalu hadir untuk berkontribusi dalam perencanaan dan evaluasi program. Jika tidak, perlu ada mekanisme komunikasi lain.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini beliau mengatakan : “Menurut saya anggota LPM biasanya hadir dalam rapat kegiatan pemberdayaan, namun kehadiran mereka masih perlu ditingkatkan untuk memastikan koordinasi yang lebih baik.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Kehadiran anggota LPM dalam rapat kegiatan pemberdayaan cukup bervariasi. Ada yang aktif hadir dan berkontribusi, tetapi ada juga yang

belum konsisten. Diperlukan komitmen lebih agar koordinasi dan pelaksanaan program berjalan optimal.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini beliau mengatakan : “Menurut saya, kehadiran anggota LPM dalam rapat cukup baik. Beberapa hadir secara rutin, namun ada juga yang belum maksimal. Perlu peningkatan partisipasi agar koordinasi lebih efektif.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini beliau mengatakan : “Menurut saya, kehadiran anggota lembaga pemberdayaan masyarakat dalam setiap rapat masih belum konsisten. Beberapa anggota hadir, namun ada juga yang terkadang tidak bisa hadir karena berbagai kendala.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Udu Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini beliau mengatakan : “Menurut saya, kehadiran anggota lembaga pemberdayaan masyarakat dalam setiap rapat belum konsisten. Beberapa anggota hadir, namun ada yang terkadang tidak bisa hadir karena alasan tertentu.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Ibu Ulu Lawing selaku Masyarakat Desa Long Berini beliau mengatakan : “Ya, anggota LPM biasanya hadir dalam setiap rapat kegiatan pemberdayaan. Mereka ikut berdiskusi, memberi masukan, dan memastikan program berjalan sesuai rencana.” (Wawancara 22 Februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Jangin Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini beliau mengatakan :

“Menurut saya, anggota LPM tidak selalu hadir dalam setiap rapat kegiatan pemberdayaan di desa. Kadang mereka datang, tapi ada juga yang tidak bisa hadir karena kesibukan atau alasan lain. Kalau mereka hadir, biasanya mereka ikut berdiskusi dan memberikan masukan yang baik untuk desa. Tapi kalau mereka tidak hadir, kadang masyarakat merasa kurang didampingi. Harapannya ke depan, anggota LPM bisa lebih aktif lagi supaya program-program di desa bisa berjalan lebih baik.” (Wawancara 22 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada *Key Informant*. Menurut Bapak bagaimana koordinasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, koordinasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa sangat penting agar program pemberdayaan berjalan efektif. Kami rutin mengadakan musyawarah desa, sosialisasi, dan kerja sama dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat lebih mudah diajak berpartisipasi dan merasakan manfaat dari program yang dijalankan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* selanjutnya, dengan memberikan pertanyaan Menurut Bapak bagaimana koordinasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah desa melalui pertemuan rutin, diskusi, dan kerja sama dalam sosialisasi program. Kami bersama-sama menyampaikan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini dengan memberikan pertanyaan yang sama, beliau mengatakan : “Kami berkoordinasi dengan pemerintah desa melalui rapat, komunikasi langsung, dan sosialisasi. Dengan kerja sama ini, kami mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, koordinasi antara LPM dan pemerintah desa harus aktif melalui komunikasi rutin dan sosialisasi. Pendekatan langsung dan musyawarah penting agar masyarakat lebih terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, koordinasi antara LPM dan pemerintah desa cukup baik, terutama melalui sosialisasi dan musyawarah, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mengajak partisipasi masyarakat.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, koordinasi sudah terjalin melalui rapat dan sosialisasi, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Diperlukan komunikasi yang lebih intensif dan strategi yang lebih menarik agar masyarakat lebih antusias berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan :
 “Koordinasi antara LPM dan pemerintah desa berjalan baik melalui rapat dan sosialisasi. Namun, agar lebih efektif, perlu pendekatan yang lebih intensif dan komunikasi yang lebih aktif dengan masyarakat.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, meskipun koordinasi antara lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sudah ada, masih ada kekurangan dalam cara menyampaikan informasi. Seringkali masyarakat kurang tertarik atau tidak paham karena informasi yang diberikan tidak cukup jelas. Diperlukan cara yang lebih mudah dimengerti dan pendekatan yang lebih aktif agar masyarakat lebih terlibat.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, koordinasi antara lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa masih perlu diperbaiki. Informasi tentang kegiatan pemberdayaan harus disampaikan dengan jelas dan cara yang lebih mudah dimengerti, agar masyarakat bisa lebih tertarik dan ikut berpartisipasi.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Ibu Ula Lawing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Koordinasi antara LPM dan pemerintah desa sudah ada, tapi masih bisa lebih ditingkatkan. Kadang informasi tentang kegiatan pemberdayaan kurang tersampaikan dengan baik ke masyarakat.” (Wawancara 22 februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Jangin Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, koordinasi antara LPM dan pemerintah desa sudah ada, tapi kadang kurang maksimal. Kadang informasi tentang kegiatan kurang sampai ke masyarakat, jadi yang ikut cuma sedikit. Kalau koordinasinya lebih aktif dan terbuka, pasti lebih banyak warga yang mau terlibat.” (wawancara 22 februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada *Key informant*. Menurut Bapak apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai penggerak bagi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah menjalankan perannya, tetapi masih perlu ditingkatkan. Kami terus berkoordinasi agar mereka lebih aktif dalam mengajak masyarakat berpartisipasi.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant*. Menurut Bapak apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai penggerak bagi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara dengan *Key informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Ya, LPM sudah menjalankan peran sebagai penggerak dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan membangun komunikasi dengan masyarakat agar mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku sekretaris LPM Desa Long Berini dengan memberikan pertanyaan yang sama, beliau mengatakan :

“Menurut saya, LPM selalu berupaya menjalankan perannya sebagai penggerak masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Kami aktif dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan program agar masyarakat terlibat secara langsung. Namun, tentu masih ada tantangan, seperti tingkat partisipasi yang bervariasi. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, LPM belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai penggerak masyarakat. Masih diperlukan upaya lebih dalam mendorong partisipasi warga serta sinergi dengan pemerintah desa agar program pemberdayaan lebih efektif.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, LPM sudah berupaya sebagai penggerak masyarakat, tetapi masih perlu pendekatan lebih intensif agar partisipasi warga semakin meningkat.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, LPM sudah berupaya menjalankan perannya sebagai penggerak, tetapi belum sepenuhnya maksimal. Masih diperlukan pendekatan yang lebih aktif dan inovatif agar masyarakat lebih termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan.” (wawancara 11 februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan :
 “Menurut saya, LPM sudah berusaha menggerakkan masyarakat, namun perlu lebih banyak cara yang menarik agar masyarakat lebih tertarik dan termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Katua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, LPM belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai penggerak. LPM masih kurang dalam hal komunikasi yang efektif dan strategi untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Banyak masyarakat yang merasa kurang terlibat atau kurang mendapatkan informasi yang jelas tentang pentingnya kegiatan pemberdayaan tersebut.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, Beliau mengatakan : “Menurut saya, LPM sudah berperan, tetapi belum maksimal. Perlu strategi yang lebih efektif agar masyarakat lebih sadar dan mau berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Ibu Ula Lawing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, LPM sudah cukup aktif dalam mengajak masyarakat. Mereka sering memberi informasi dan mendorong warga untuk ikut dalam berbagai kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 22 februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Jangin Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, LPM sudah berusaha menjalankan perannya, tapi masih perlu ditingkatkan. Kadang mereka aktif mengajak masyarakat, tapi belum semua warga merasa terdorong untuk ikut serta. Kalau sosialisasi dan pendampingannya lebih sering, mungkin masyarakat akan lebih semangat berpartisipasi.” (Wawancara 22 februari 2025).

4.2.1.2. Peran Sebagai Fasilitator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator yang dimaksud adalah mampu memfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan bidang pembangunan yang diperuntukkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga harus mampu mendampingi dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan keterampilan masyarakat agar program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk mendapatkan jawaban yang mendukung penelitian ini, maka peneliti memberikan pertanyaan kepada *Key Informant*. Menurut Bapak apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjalankan perannya sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “Menurut saya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah berupaya menjalankan perannya dalam penyediaan sarana dan prasarana, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM

Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Ya, saya bersama LPM berupaya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemberdayaan, baik melalui koordinasi dengan pemerintah desa maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“LPM berperan dalam membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan, baik melalui pengajuan usulan kepada pemerintah desa maupun dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kami berusaha memastikan fasilitas yang dibutuhkan dapat mendukung kelancaran program, meskipun masih ada kendala yang perlu terus diatasi bersama.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, saya melihat bahwa LPM sudah berupaya menjalankan perannya dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan. Namun, masih bergantung pada anggaran, koordinasi dengan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat. Evaluasi dan peningkatan sinergi tetap diperlukan agar perannya lebih optimal.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, LPM sudah berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan, namun masih perlu peningkatan agar lebih optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat dalam kegiatan yang akan diadakan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, LPM sudah berusaha menyediakan sarana dan prasarana, tetapi masih terbatas. Diperlukan dukungan lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun pihak lain, agar fasilitas yang disediakan benar-benar memadai dan mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan.” (11 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan :
 “Menurut saya, LPM sudah menyediakan sarana dan prasarana, tapi masih ada kekurangan. Diperlukan perbaikan dan dukungan lebih agar fasilitas yang ada cukup dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dengan lebih efektif.”
 (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :
 “Menurut saya, lembaga pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai penyedia sarana dan prasarana. Beberapa kegiatan masih terkendala dengan terbatasnya fasilitas yang ada.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, LPM sudah berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung keberhasilan program pemberdayaan.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Ibu Ulu Lawaing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut

saya, beberapa kegiatan memang sudah difasilitasi oleh LPM, tapi tidak semua masyarakat mendapat kesempatan yang sama. Mungkin kalau ada lebih banyak bantuan, programnya bisa lebih merata.” (Wawancara 22 februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Jangin Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “Menurut saya, LPM belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih banyak kekurangan dalam penyediaan sarana dan prasarana.” (Wawancara 22 februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Key Informant* dengan memberikan pertanyaan yang berbeda. Menurut Bapak bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut? Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan dengan cara langsung berkomunikasi dengan masyarakat, melakukan pendataan, dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah desa. Dengan begitu, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, kami sebagai LPM berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat dengan mengadakan musyawarah, mendengar aspirasi warga, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini, beliau berpendapat bahwa:

“LPM berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, tetapi tantangannya adalah memastikan semua suara didengar dan program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan prioritas warga. Kami terus berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat agar kegiatan pemberdayaan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.” (Wawancara 10 Februari 2025)

Berikutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :
 “Menurut saya, LPM berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah dan koordinasi, sehingga program pemberdayaan lebih tepat sasaran.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan :
 “Menurut saya, LPM sudah berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan, namun masih perlu peningkatan agar lebih optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau meengatakan :

“LPM berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat melalui musyawarah dan survei. Namun, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar lebih akurat dan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“LPM berperan aktif dengan melakukan musyawarah dan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan serta prioritas masyarakat. Namun, perlu lebih

banyak keterlibatan langsung agar hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, lembaga pemberdayaan masyarakat berperan cukup baik dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat, namun masih perlu meningkatkan pendekatan agar lebih mendalam dan melibatkan lebih banyak warga dalam proses tersebut.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, lembaga pemberdayaan masyarakat sudah berupaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, tetapi masih perlu lebih sering berkomunikasi langsung dengan masyarakat agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Ibu Ula Lawaing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Saya belum merasakan peran LPM dalam mengidentifikasi kebutuhan warga. Sejauh ini, program yang berjalan sepertinya masih belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat.” (Wawancara 22 februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Jangin Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau berpendapat bahwa :

“Peran LPM dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat masih kurang maksimal. Terkadang keputusan diambil tanpa melibatkan semua elemen masyarakat, sehingga beberapa kebutuhan yang dianggap prioritas oleh warga tidak selalu mendapat perhatian.” (Wawancara 22 ferbuari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Key Informant* dengan memberikan pertanyaan yang berbeda. Menurut Bapak apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mendampingi dan memfasilitasi kegiatan

pemberdayaan yang dilakukan sudah sesuai? Berdasarkan hasil wawancara bersama *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “Menurut saya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah menjalankan perannya dalam mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan, namun masih perlu peningkatan dalam koordinasi dan pelaksanaannya agar lebih maksimal.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Ya, kami sudah menjalankan peran dalam mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan sesuai dengan tugas saya, dengan memastikan masyarakat mendapatkan dukungan yang diperlukan agar kegiatan berjalan dengan baik.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“LPM berupaya mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang masih perlu dikelola. Kami terus berusaha meningkatkan peran ini agar program pemberdayaan lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “Sebagai Ketua BPD, saya melihat LPM sudah berupaya mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan, namun masih perlu peningkatan dalam efektivitas dan koordinasi agar lebih optimal.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Ibu agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Sebagai Ketua PKK, saya melihat LPM sudah berupaya mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, namun masih perlu peningkatan agar lebih efektif dan merata.” (wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau megatakan :

“LPM sudah mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Masih diperlukan pendampingan yang lebih intensif dan dukungan yang lebih konkret agar hasilnya lebih maksimal dan berkelanjutan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “LPM sudah mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan, namun masih perlu peningkatan dalam pendampingan agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” (Wawancara 12 Februari2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Katua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, lembaga pemberdayaan masyarakat sudah mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dengan baik, namun masih ada kekurangan dalam hal pengawasan dan tindak lanjut agar hasilnya lebih maksimal. “Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Udaul Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, lembaga pemberdayaan masyarakat sudah menjalankan perannya, tetapi belum sepenuhnya efektif. Masih ada kendala dalam pendampingan dan fasilitas yang diberikan, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan belum meratanya manfaat yang dirasakan masyarakat. Perlu evaluasi dan strategi yang lebih baik agar program benar-benar tepat sasaran.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Ula

Lawing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, LPM masih belum cukup maksimal dalam mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan. Mereka aktif dalam memberikan arahan, namun penyediaan sarana yang diperlukan masih belum tercukupi, serta masih belum maksimal dalam membantu masyarakat memahami manfaat dari program yang dijalankan.” (Wawancara 22 februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada *informant* Bapak Jangin

Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“LPM belum sepenuhnya menjalankan perannya dalam mendampingi kegiatan pemberdayaan. Banyak kegiatan yang berjalan tanpa pendampingan yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan dalam mengakses bantuan atau menjalankan program dengan maksimal.” (Wawancara 22 februari 2025).

4.2.1.3. Peran Sebagai Mediator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mediator adalah untuk mensosialisasikan beberapa hasil usulan dari realisasi pemberdayaan masyarakat desa yang telah ditetapkan dan dijadikan rancangan, melakukan sosialisasi kegiatan seperti pihak-pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendapatkan jawaban yang tepat dalam mendukung penelitian ini, maka peneliti memberikan pertanyaan kepada *Key Informant*. Menurut menurut Bapak bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam

mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan dalam mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pertemuan, sosialisasi langsung, serta memanfaatkan media komunikasi yang ada di desa. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui dan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, LPM sudah berperan dalam mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan dengan mengadakan pertemuan, berdiskusi langsung dengan masyarakat, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan masyarakat dapat berpartisipasi.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini, beliau berpendapat bahwa :

“Menurut saya, LPM berperan penting dalam mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan dengan menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat. LPM bertugas menghubungkan pemerintah dengan warga, mengajak partisipasi aktif, serta memastikan program yang dijalankan dapat dipahami dan diterima. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pertemuan warga, media sosial, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat, sehingga kegiatan pemberdayaan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini dengan memberikan pertanyaan yang sama, beliau mengatakan : “Sebagai Ketua BPD, saya menilai LPM berperan penting dalam mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan melalui

musyawarah, media informasi desa, dan komunikasi langsung dengan masyarakat.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga memastikan bahwa sosialisasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Artinya, mereka harus memahami kebutuhan masyarakat, menggunakan metode komunikasi yang sesuai, serta memastikan adanya tindak lanjut agar program pemberdayaan benar-benar berdampak dan tidak hanya sekadar formalitas.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, LPM sudah berperan dalam sosialisasi kegiatan pemberdayaan melalui pertemuan dan media informasi. Namun, masih perlu pendekatan yang lebih luas dan interaktif agar masyarakat lebih memahami dan tertarik untuk berpartisipasi.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau berpendapat bahwa :

“Menurut saya, LPM sudah melaksanakan perannya, namun hasilnya belum maksimal karena mungkin masih kurangnya sosialisasi yang mendalam tentang kegiatan yang akan dilakukan, keterlibatan aktif masyarakat, atau dukungan yang memadai dari pihak terkait.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan :
 “Menurut saya, LPM berperan dalam mensosialisasikan kegiatan dengan cara

memberikan informasi melalui pertemuan dan media lokal, namun perlu lebih intensif agar seluruh masyarakat bisa ikut serta.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam sosialisasi sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan. Penyampaian informasi harus lebih aktif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar partisipasi lebih maksimal.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Ibu Ula Lawing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau berpendapat bahwa :

“Sejauh ini saya jarang mendapatkan informasi tentang kegiatan pemberdayaan dari LPM. Mungkin karena sosialisasi lebih banyak dilakukan di pertemuan tertentu yang tidak semua ibu bisa hadir. Kalau ada cara lain seperti pengumuman dari rumah ke rumah atau melalui kader posyandu, pasti lebih baik.” (Wawancara 22 februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Jangin Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau berpendapat bahwa : “LPM sudah berusaha mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan, tetapi terkadang informasinya belum merata. Ada warga yang mengetahui kegiatan lebih awal, sementara yang lain baru mengetahuinya saat kegiatan sudah berlangsung.” (Wawancara 22 februari 2025).

Mengenai penjelasan yang disampaikan di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada *Key Informant*. Menurut Bapak apakah ada pertemuan yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil kegiatan pemberdayaan yang sudah dilaksanakan? Berdasarkan hasil wawancara

peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Ya, pertemuan evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan pihak terkait. Dalam pertemuan ini, kami membahas hasil kegiatan, kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan untuk ke depannya.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “Ya, kami mengadakan pertemuan evaluasi untuk meninjau hasil kegiatan pemberdayaan, membahas kendala yang dihadapi, serta merencanakan perbaikan agar kegiatan selanjutnya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Ya, biasanya LPM mengadakan pertemuan evaluasi untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi kendala, dan merancang perbaikan. Evaluasi ini penting agar kegiatan pemberdayaan lebih efektif dan tepat sasaran.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Sebagai Ketua BPD, saya melihat bahwa pertemuan evaluasi biasanya dilakukan melalui musyawarah desa untuk menilai hasil kegiatan pemberdayaan dan merencanakan perbaikan ke depan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Ya, tetapi evaluasi tidak boleh hanya bersifat formalitas. Pertemuan harus benar-benar mengkaji dampak nyata program di masyarakat, mendengarkan masukan warga, serta menghasilkan langkah konkret untuk perbaikan, bukan sekadar laporan administratif. “(Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau megatakan bahwa : “Ya, ada pertemuan evaluasi, tetapi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar lebih mendalam dan menghasilkan perbaikan nyata bagi kegiatan pemberdayaan ke depan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, meskipun pertemuan evaluasi sudah dilakukan, seringkali belum cukup mendalam atau partisipasi dari masyarakat kurang, sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Evaluasi perlu dilakukan lebih transparan dan melibatkan lebih banyak pihak terkait.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa: “Menurut saya, pertemuan evaluasi sudah dilakukan, tapi perlu lebih sering agar kita bisa melihat hasil kegiatan dan memperbaiki kekurangan yang ada.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, pertemuan evaluasi masih kurang optimal. Jika pun ada, pelaksanaannya belum rutin dan kurang melibatkan masyarakat secara

luas. Evaluasi seharusnya lebih transparan dan melibatkan semua pihak agar hasil kegiatan benar-benar bermanfaat dan perbaikan bisa dilakukan secara nyata.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *Informant* Ibu Uluu

Lawaing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Kadang ada pertemuan evaluasi, tetapi tidak rutin. Biasanya hanya dilakukan jika ada masalah atau jika ada program baru yang akan dijalankan. Kami berharap evaluasi bisa dilakukan lebih sering agar semua warga bisa menyampaikan pendapatnya.” (Wawancara 22 februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Jangin

Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : "Kadang-kadang ada evaluasi, tetapi sifatnya tidak resmi. Biasanya hanya dibahas saat ada pertemuan desa atau saat warga berkumpul di acara lain. Kami berharap ada forum khusus untuk membahas hasil kegiatan dengan lebih jelas." (Wawancara 22 februari 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada *Key Informant*. Menurut Bapak apa peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian masalah atau konflik antar masyarakat yang terjadi? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan sebagai mediator dengan cara menampung aspirasi, memfasilitasi musyawarah, dan membantu mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Mereka bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memastikan penyelesaian masalah dapat dilakukan secara damai dan mengutamakan kepentingan bersama.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau menagatkan :

“Kami berperan sebagai mediator dengan memfasilitasi musyawarah antara pihak yang berselisih, mendengarkan aspirasi mereka, dan mencari solusi yang adil serta menguntungkan semua pihak, agar masalah dapat diselesaikan dengan damai dan tetap menjaga keharmonisan di masyarakat.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, LPM berperan sebagai mediator dengan menjembatani berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah. LPM membantu mencari solusi yang adil dengan mendengar semua aspirasi, memberikan pemahaman, dan mendorong penyelesaian yang mengutamakan kepentingan bersama. Dengan pendekatan yang netral dan berbasis kebersamaan, LPM dapat membantu menciptakan harmoni di masyarakat.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Sebagai Ketua BPD, saya menilai LPM berperan sebagai mediator dengan memfasilitasi musyawarah, mencari solusi bersama, dan menjaga komunikasi yang harmonis agar konflik dapat diselesaikan secara damai.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan sebagai penengah yang memfasilitasi dialog, mencari solusi bersama, dan memastikan penyelesaian konflik yang adil serta berbasis musyawarah, agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau mengatakan

: “LPM berperan sebagai penengah dengan memfasilitasi dialog dan mencari solusi bersama melalui musyawarah. Ke depan, peran ini dapat lebih diperkuat agar penyelesaian masalah berjalan lebih efektif dan harmonis.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mediator masih sering terbatas. Terkadang, lembaga ini kurang memiliki kapasitas atau independensi untuk menangani konflik secara efektif, sehingga penyelesaian masalah bisa terhambat atau tidak tuntas. Dibutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan inklusif agar konflik dapat diselesaikan dengan baik.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mediator masih kurang efektif. Terkadang, lembaga ini tidak cukup tegas atau kurang memiliki kapasitas untuk menangani konflik dengan baik, sehingga penyelesaian masalah sering kali tidak tuntas. Dibutuhkan pendekatan yang lebih profesional agar konflik dapat diselesaikan secara lebih adil dan cepat.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mediator dalam konflik masih belum optimal. Sering kali, penyelesaian masalah kurang transparan atau hanya melibatkan pihak tertentu. Diperlukan pendekatan yang lebih adil, netral, dan melibatkan semua pihak terkait agar konflik dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berlarut-larut.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Ula Lawing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“LPM kadang membantu menyelesaikan masalah, tetapi perannya belum terlalu terlihat. Mungkin karena mereka lebih fokus pada pembangunan desa dibandingkan menangani konflik sosial. Akan lebih baik jika mereka lebih aktif dalam mendampingi warga yang mengalami perselisihan.” (Wawancara 22 Februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Jangin

Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“LPM terkadang ikut serta dalam menyelesaikan masalah, tetapi tidak selalu. Biasanya, konflik lebih sering diselesaikan oleh kepala desa, RT, atau tokoh adat. Namun, jika masalah berkaitan dengan program pemberdayaan, LPM biasanya turun tangan untuk mencari solusi.” (Wawancara 22 Februari 2025).

4.2.1.4. Peran Sebagai Motivator

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai motivator adalah dapat mendorong masyarakat desa untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kreativitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Motivator dipandang sebagai pemimpin dan pelopor pembangunan, sehingga tantangannya adalah menciptakan motivator pemberdayaan masyarakat. Banyak hal yang harus dipersiapkan, antara lain persiapan ketahanan pribadi, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosial, kemampuan mengajak, menggerakkan, menjembatani dan kemampuan menjadi fasilitator. Jadi, peran motivator sangat penting dan strategis. Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi tempat memfokuskan upaya masyarakat.

Untuk mendapatkan jawaban yang tepat dalam mendukung penelitian ini, maka peneliti memberikan pertanyaan kepada *Key Informant*. Menurut Bapak apakah lembaga pemberdayaan masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai

motivator bagi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah berupaya menjalankan perannya sebagai motivator, tetapi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih antusias dan aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Ya, kami sudah menjalankan peran sebagai motivator dengan mengajak, membimbing, dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Ya, LPM telah menjalankan perannya sebagai motivator dalam pemberdayaan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan seperti partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang perlu terus ditingkatkan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Sebagai Ketua BPD, saya melihat LPM sudah berupaya menjadi motivator bagi masyarakat, namun masih perlu penguatan peran agar partisipasi dan kesadaran

warga dalam kegiatan pemberdayaan semakin meningkat.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Agustiarli Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan : “LPM sudah berperan sebagai motivator, tetapi perlu memastikan pendekatan yang lebih aktif dan inovatif agar masyarakat benar-benar termotivasi, tidak hanya sekadar mengikuti program, tetapi juga berinisiatif dalam pemberdayaan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau mengatakan : “LPM sudah berupaya menjalankan perannya sebagai motivator, namun masih perlu pendekatan yang lebih kreatif dan berkelanjutan agar masyarakat lebih antusias dan aktif dalam kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, lembaga pemberdayaan masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai motivator, namun terkadang masih kurang dalam memberikan dorongan yang berkelanjutan dan menciptakan rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap program pemberdayaan.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, lembaga pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya berhasil memotivasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan seringkali kurang menarik dan kurang memperhatikan kebutuhan serta kondisi nyata

masyarakat, sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan pemberdayaan masih rendah.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, lembaga pemberdayaan masyarakat sudah berusaha memberi semangat kepada warga, tapi masih perlu lebih aktif agar masyarakat lebih tertarik dan mau ikut dalam kegiatan yang diadakan.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Ulu Lawing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Saya merasa LPM masih kurang dalam memberikan motivasi kepada masyarakat. Banyak warga yang belum paham pentingnya program pemberdayaan karena sosialisasi dan dorongan dari LPM masih terbatas. Mungkin kalau mereka lebih aktif turun langsung ke masyarakat, hasilnya akan lebih baik.” (Wawancara 22 Februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Jangin Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Sejujurnya, saya belum merasakan peran LPM sebagai motivator secara langsung. Mereka mungkin sudah melakukan upaya, tetapi belum menjangkau semua warga. Kalau mereka lebih aktif mendatangi masyarakat satu per satu atau menggunakan cara yang lebih menarik, mungkin kami akan lebih semangat mengikuti program yang ada.” (Wawancara 22 februari 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang berbeeda kepada *Key Informant*. Menurut Bapak bagaimana bentuk dukungan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai motivator untuk menciptakan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mendukung dengan memberikan pendampingan, pelatihan, dan fasilitas agar masyarakat bisa lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Kami mendukung dengan memberikan dorongan, bimbingan, dan fasilitas yang diperlukan, serta mengadakan pelatihan agar masyarakat dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “LPM mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat dengan memberikan pelatihan, akses modal, membangun kemitraan, pendampingan berkelanjutan, serta apresiasi atas ide-ide inovatif.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Sebagai Ketua BPD, saya menilai LPM mendukung dengan memberikan pendampingan, pelatihan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“LPM harus lebih dari sekadar fasilitator; mereka harus aktif mendorong kreativitas dengan memberikan akses nyata ke sumber daya, membangun

ekosistem yang mendukung inovasi, serta memastikan bahwa ide-ide masyarakat tidak hanya didorong, tetapi juga diwujudkan dan berkelanjutan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “LPM mendukung dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitas. Namun, diperlukan inovasi lebih lanjut agar masyarakat semakin termotivasi untuk berkreasi dan mengembangkan potensinya.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, dukungan lembaga pemberdayaan masyarakat masih terbatas dalam memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan inovasi masyarakat. Meskipun pelatihan dan fasilitas diberikan, seringkali kurang adanya tindak lanjut atau dukungan yang konkret untuk implementasi ide-ide tersebut, sehingga inovasi tidak berkembang secara maksimal.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, dukungan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai motivator bisa berupa pelatihan, penyediaan fasilitas, dan dorongan untuk menciptakan ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, lembaga pemberdayaan masyarakat mendukung dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan akses ke berbagai peluang. Namun, dukungan ini masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan benar-benar

mendorong kreativitas serta inovasi masyarakat.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Ulu Lawaing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Mereka sudah membantu, tapi masih terbatas. Kalau ada lebih banyak pelatihan dan bantuan modal, mungkin masyarakat bisa lebih berkembang.” (Wawancara 22 februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Jangin Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, LPM belum terlalu aktif dalam mendorong kreativitas masyarakat. Sejauh ini, belum banyak program yang benar-benar membantu warga untuk berinovasi dalam usaha atau keterampilan baru. Jika mereka lebih sering mengadakan pelatihan atau bekerja sama dengan pihak luar, mungkin akan lebih terasa manfaatnya.” (Wawancara 22 februari 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada *Key Informant*. Menurut Bapak apakah ada perubahan atau dorongan terhadap masyarakat dari dukungan dan motivasi yang diberikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “Ya, dukungan dan motivasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan peluang dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.” (Wawancara 10 februari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Ketua LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Ya, dukungan dan motivasi yang kami berikan telah mendorong masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dari kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Ya, dukungan dan motivasi dari LPM mendorong perubahan positif di masyarakat. Ini terlihat dari meningkatnya partisipasi, kemandirian ekonomi, serta perubahan pola pikir yang lebih proaktif dalam pembangunan.” (Wawancara 10 Februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Ngau selaku Ketua BPD Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Sebagai Ketua BPD, saya melihat ada perubahan positif, seperti meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, meskipun masih perlu upaya berkelanjutan agar dampaknya lebih maksimal.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Ya, sudah ada usaha dan beberapa perubahan terlihat, tetapi masih belum maksimal. Tantangannya adalah memastikan dukungan yang lebih konkret, pendampingan yang berkelanjutan, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata masyarakat agar dampaknya lebih signifikan.” (Wawancara 11 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini, beliau mengatakan

: “Ya, sudah ada perubahan, tetapi masih bertahap. Dukungan dan motivasi perlu lebih diperkuat agar dampaknya lebih luas dan masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.” (wawancara 11 februari 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur pembangunan Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, ada perubahan positif di masyarakat, tapi dorongan dari lembaga pemberdayaan masyarakat belum cukup kuat untuk mendorong partisipasi aktif atau perubahan yang tahan lama. Dukungan yang diberikan perlu lebih fokus dan terus-menerus agar dampaknya lebih besar.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Menurut saya, ada perubahan positif, namun dorongan yang diberikan masih kurang kuat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan pemberdayaan.” (Wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Menurut saya, ada perubahan, tetapi belum signifikan. Beberapa masyarakat mulai lebih aktif, tetapi masih banyak yang kurang terlibat. Dukungan dan motivasi perlu lebih intensif agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.” (wawancara 12 Februari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Ibu Ula Lawaing selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan : “Saya merasa ada dorongan dari LPM, tetapi belum terlalu signifikan. Mereka sudah

memberikan motivasi, tapi mungkin perlu lebih banyak bimbingan agar masyarakat bisa lebih berkembang.” (Wawancara 22 februari 2025).

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada *Informant* Bapak Jangin Salu selaku Masyarakat Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa : “Sejauh ini, saya belum terlalu merasakan manfaat dari motivasi yang diberikan oleh LPM. Mungkin karena saya belum terlibat langsung dalam kegiatan mereka.” (Wawancara 22 februari 2025).

4.2.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Adapun faktor dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan *Key Informant*, yaitu sebagai berikut :

4.2.2.1. Faktor Pendukung

Peneliti akan menyajikan tanggapan *Key Informant* mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat guna mendukung penelitian ini, maka peneliti akan memberikan pertanyaan kepada *Key Informant*. Menurut Bapak apa saja faktor pendukung peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan bahwa :

“Ada beberapa faktor yang mendukung peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini. Pertama, partisipasi aktif masyarakat.

Kedua, dukungan dari pemerintah desa, terutama dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten dalam LPM juga menjadi faktor utama serta ketersediaan dana dan sarana prasarana juga menjadi faktor penting, baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pihak eksternal dalam bentuk pendampingan, pelatihan, serta bantuan teknis. Adat dan budaya juga memiliki peran penting karena nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dapat memperkuat solidaritas. Terakhir inovasi dan kreativitas dalam kegiatan pemberdayaan harus dikembangkan, agar potensi lokal dapat dimanfaatkan secara maksimal.” (Wawancara 10 Februari 2025).

4.2.2.2. Faktor Penghambat

Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait faktor penghambat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini kepada *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini, beliau mengatakan :

“Ada beberapa faktor penghambat peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini, antara lain keterbatasan sumber daya, baik dalam anggaran, tenaga, maupun sarana prasarana, yang menjadi kendala, kurangnya pemahaman serta kapasitas anggota LPM dalam menjalankan tugas dan perannya, sehingga perencanaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat masih terbatas.” (Wawancara 10 Februari 2025).

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan penelitian dokumen yaitu melalui data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian untuk memudahkan dalam penelitian dan penyajian data. Berikut peneliti kemukakan pembahasan mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini.

4.3.1. Peran LPM Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini

Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 133 Ayat 5 menjelaskan peran LPM yaitu :

1. Membina kerjasama antara lembaga untuk pembangunan;
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral;
3. Mengusahakan tumbuh dan berkembangnya kesadaran kritis masyarakat akan manfaat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas LPM dalam upaya pengembangan sumber daya manusia bagi pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini belum sepenuhnya dijalankan, yang dapat dilihat dari kurangnya kapasitas LPM dalam menjalankan tugas dan perannya yaitu penyampaian informasi dan sosialisasi dari LPM yang tidak transparan ketika ada kegiatan pemberdayaan, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara LPM dengan pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat seperti dalam musyawarah yang dilakukan hanya melibatkan beberapa masyarakat saja. Karena minimnya sosialisasi masyarakat tidak mengetahui jika ada kegiatan pelatihan yang diadakan, yang mana masyarakat akan sangat terbantu dengan kegiatan pelatihan tersebut. Selain itu, program pemberdayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan

prioritas masyarakat seperti kegiatan pelatihan kerajinan tangan, karena minimnya pasar dan bahan baku sulit untuk didapat, akibatnya program tidak diminati dan hasil pelatihan tidak berkelanjutan.

4.3.1.1. Peran Sebagai Dinamisator

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Long Berini, peneliti mendapatkan informasi dari *Key Informant* dan *Informant*. Pada bagian ini peneliti menyajikan deskripsi terhadap semua data hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis sesuai dengan teknik analisis data yang dikemukakan. Pembahasan dalam hasil penelitian ini merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Materi yang disajikan adalah temuan-temuan penting dari variabel yang diteliti dan diuraikan secara jelas. Dalam teori menurut Soerjono Soekanto (2002:243) membagi indikator peran menjadi peran sebagai dinamisator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai mediator, dan peran sebagai motivator.

Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 133 Ayat 2 peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program yang dijalankan. Sebagai dinamisator, LPM memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan dengan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan program yang ada, serta memberikan pendampingan yang diperlukan agar masyarakat dapat terlibat secara aktif. Selain itu, LPM juga harus mampu

menyediakan solusi atas setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan dengan lancar.

Meskipun LPM telah cukup berperan sebagai dinamisator, kehadiran anggota LPM dalam setiap rapat dan kegiatan pemberdayaan masih belum konsisten. Beberapa informan mengungkapkan bahwa kehadiran anggota LPM dalam setiap pertemuan masih bervariasi, yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Meskipun demikian, ada juga pengakuan bahwa LPM berusaha untuk selalu hadir dan memastikan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ada kendala yang menyebabkan ketidakhadiran mereka dalam beberapa kesempatan, seperti kesibukan dan faktor lainnya yang menghambat kehadiran dalam rapat atau kegiatan yang diselenggarakan.

Koordinasi yang efektif antara LPM dan pemerintah desa juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pemberdayaan. Meskipun komunikasi dan koordinasi antara LPM dan pemerintah desa sudah ada melalui musyawarah desa, rapat rutin, dan sosialisasi, cara penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan. Pendekatan yang lebih intensif dan sistematis diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam mengikuti program pemberdayaan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dalam menjaga koordinasi, masih ada ruang untuk memperbaiki cara penyampaian informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, LPM di Desa Long Berini belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai dinamisator atau penggerak

masyarakat, masih terdapat kekurangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan, ada tantangan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih efektif. Sinergi antara LPM dan pemerintah desa perlu diperkuat agar efektivitas program pemberdayaan dapat ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun LPM berperan penting, ada kebutuhan untuk mengoptimalkan pendekatan yang lebih menarik dan strategi yang lebih efektif agar masyarakat lebih tertarik dan terdorong untuk terlibat aktif, seperti kegiatan pelatihan pengelolaan hasil perkebunan yang diadakan dalam sebuah musyawarah, tetapi karena kurangnya inisiatif LPM untuk menggerakkan masyarakat agar hadir dalam musyawarah tersebut yang akibatnya tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah sangat rendah.

4.3.1.2. Peran Sebagai Fasilitator

Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 133 Ayat 4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini, khususnya sebagai fasilitator dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai fasilitator, LPM memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kelancaran setiap program pemberdayaan yang dijalankan, yang mencakup kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta peningkatan keterampilan masyarakat agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. LPM diharapkan

dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan.

Dalam pelaksanaannya, LPM telah berusaha maksimal untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberdayaan. Namun, meskipun ada upaya dari LPM untuk menyediakan fasilitas tersebut, masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi efektivitas peran LPM dalam penyediaan sarana dan prasarana adalah keterbatasan anggaran. Selain itu, kurangnya koordinasi yang maksimal antara LPM, pemerintah desa, dan masyarakat, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana fasilitas yang disediakan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Meskipun demikian, meskipun fasilitas yang ada sudah cukup memadai, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif dan maksimal.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, LPM telah berusaha keras untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun demikian, beberapa kendala dan tantangan masih harus diatasi. Fasilitas yang tersedia saat ini masih terbatas dan memerlukan dukungan lebih dari pemerintah maupun pihak eksternal lainnya. Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat merasa bahwa fasilitas yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka, yang memengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan kualitas fasilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi warga desa.

Selain itu, LPM juga memegang peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat, yang merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan program pemberdayaan. Proses identifikasi ini dilakukan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat, di mana LPM mendata kebutuhan yang ada dan menyampaikannya kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan. Meski demikian, ada pengakuan bahwa meskipun LPM sudah berusaha menjalankan peran ini, proses identifikasi kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Terkadang, hasil dari proses identifikasi kebutuhan tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan atau kebutuhan mayoritas masyarakat, karena ada kalanya tidak semua masyarakat terlibat secara langsung dalam proses musyawarah atau kegiatan identifikasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih mendalam dan lebih inklusif agar keputusan yang diambil lebih akurat, mencerminkan prioritas yang sebenarnya, serta sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Terkait dengan pendampingan dan fasilitasi yang diberikan oleh LPM, mayoritas pandangan menunjukkan bahwa LPM sudah berupaya menjalankan peran tersebut dengan cukup baik. Pendampingan yang diberikan kepada masyarakat selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan cukup signifikan, namun, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pendampingan yang diberikan sudah cukup, namun masih ada kekurangan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan

program yang perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu, terdapat pengakuan bahwa meskipun LPM telah berusaha memberikan pendampingan yang optimal, masih ada keterbatasan dalam hal sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pendampingan dan fasilitasi yang diberikan. Meskipun LPM berusaha semaksimal mungkin, ada beberapa faktor yang membatasi kemampuan mereka untuk memberikan pendampingan yang optimal, seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan dana yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak LPM, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Meskipun LPM telah memberikan pendampingan, masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan. Meskipun program pemberdayaan sudah dimulai, pengawasan terhadap jalannya kegiatan serta tindak lanjut untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang maksimal, belum sepenuhnya optimal. Beberapa pihak juga mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk mendampingi masyarakat, ada beberapa aspek yang masih kurang, seperti sosialisasi yang belum menyeluruh, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan dalam hal sumber daya yang berdampak pada kelancaran program.

Dari perspektif masyarakat, beberapa warga juga menyampaikan masukan yang serupa, yaitu meskipun LPM aktif memberikan arahan dan informasi terkait dengan program pemberdayaan, penyediaan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut belum sepenuhnya tercukupi. Masyarakat merasa bahwa jika ada lebih banyak dukungan, program pemberdayaan akan lebih merata dan lebih

banyak memberikan manfaat bagi seluruh warga desa. Mereka berharap agar LPM dapat meningkatkan fasilitasi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, serta melakukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga setiap warga desa dapat merasakan manfaat dari kegiatan pemberdayaan secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, LPM di Desa Long Berini belum sepenuhnya berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan. Evaluasi yang lebih mendalam terhadap proses koordinasi, pengawasan, serta pendampingan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas LPM dalam menjalankan perannya, seperti kegiatan pelatihan yang diusulkan masyarakat kurang mendapat perhatian.

4.3.1.3. Peran Sebagai Mediator

Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 133 Ayat 4 (e) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memegang peran yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini. Sebagai mediator, LPM memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan berbagai masalah atau konflik yang muncul dalam masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan melalui sosialisasi yang efektif. Peran LPM dalam mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan serta dalam mediasi konflik menjadi kunci utama dalam proses pemberdayaan yang berkelanjutan dan sukses di desa tersebut.

Sosialisasi kegiatan pemberdayaan, salah satu peran utama LPM adalah mengedukasi masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan ini, LPM menggunakan berbagai cara komunikasi, seperti pertemuan langsung dengan masyarakat, pemanfaatan media komunikasi lokal, serta kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah dikenal oleh warga. LPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mendapat informasi yang jelas dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi yang baik antara LPM, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Namun demikian, meskipun berbagai metode sosialisasi sudah diterapkan, masih terdapat kekurangan dalam hal cakupan dan kedalaman pendekatan yang dilakukan. Beberapa masyarakat menyarankan agar pendekatan sosialisasi dapat dilakukan secara lebih interaktif dan menyeluruh, serta mencakup lebih banyak lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak dapat hadir dalam pertemuan umum. Beberapa pihak juga mengusulkan penggunaan metode sosialisasi yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti pengumuman dari rumah ke rumah atau pemanfaatan kader posyandu untuk menjangkau warga yang sulit diakses melalui pertemuan besar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program-program pemberdayaan yang dilaksanakan.

Evaluasi kegiatan pemberdayaan, selain sosialisasi, evaluasi kegiatan pemberdayaan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program. Evaluasi yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk

menilai apakah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang ada serta merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk kegiatan selanjutnya. Meskipun evaluasi sudah dilakukan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pertemuan evaluasi. Beberapa pihak menyarankan agar evaluasi dilakukan lebih sering, lebih transparan, dan dengan pendekatan yang lebih mendalam. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan pemberdayaan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Peran LPM sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, selain sosialisasi dan evaluasi, LPM juga memegang peran kunci sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai mediator, LPM bertugas untuk memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Hal ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik yang lebih besar di masa depan. LPM berusaha untuk menjadi penengah yang objektif, menampung aspirasi masyarakat, dan memastikan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara damai. Namun, meskipun peran LPM sebagai mediator diakui, terkadang penyelesaian konflik yang difasilitasi oleh LPM belum maksimal. Beberapa pihak mencatat bahwa LPM sering kali menghadapi keterbatasan dalam kapasitas dan pendekatan dalam menangani konflik. Misalnya, kurangnya ketegasan dalam menyelesaikan masalah atau tidak adanya tindak lanjut yang tegas dalam beberapa kasus bisa menyebabkan masalah tidak tuntas. Oleh karena

itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis dalam menangani konflik agar hasilnya lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh LPM dalam menjalankan peran sebagai mediator dan sosialisator adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pertemuan evaluasi, sosialisasi yang belum merata, serta penyelesaian konflik yang belum optimal. Beberapa pihak menyarankan agar LPM lebih tegas dalam menjalankan perannya, lebih terorganisir dalam proses sosialisasi dan mediasi, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam setiap proses tersebut. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dan meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara LPM, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan setiap kegiatan pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, LPM di Desa Long Berini belum sepenuhnya menjalankan peran yang signifikan dalam mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan dan menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Peningkatan transparansi, frekuensi pertemuan evaluasi yang masih kurang, serta penggunaan metode komunikasi yang belum inklusif, karena sangat membantu memastikan bahwa setiap kegiatan pemberdayaan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas LPM dalam menyelesaikan konflik secara tegas dan tepat waktu juga menjadi langkah penting untuk menjaga keharmonisan sosial di desa, seperti sengketa lahan yang terjadi karena kurangnya mediasi dari LPM serta penanganan

kasus yang lambat membuat masalah terus berlanjut dan menjadi masalah yang perlu adanya penengah sebagai solusi untuk masalah tersebut.

4.3.1.4. Peran Sebagai Motivator

Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Pemerintahan Pasal 133 Ayat 1 Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memainkan peran yang sangat penting sebagai motivator dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini. Sebagai motivator, LPM memiliki tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar lebih kreatif, bersemangat, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang diadakan. Meskipun LPM telah berupaya menjalankan perannya dengan baik, tantangan-tantangan tertentu masih harus dihadapi agar efektivitas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Sebagai motivator, LPM bertugas untuk mendorong masyarakat desa untuk berusaha seoptimal mungkin dalam meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan mereka. Peran ini mencakup upaya untuk membangkitkan semangat masyarakat agar mereka merasa termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Walaupun demikian, meskipun LPM telah melakukan upaya ini, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Beberapa pihak mencatat bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masih tergolong rendah, yang sebagian besar disebabkan oleh pendekatan yang digunakan LPM yang belum cukup menarik dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa LPM perlu merumuskan strategi

motivasi yang lebih efektif dan menyeluruh agar partisipasi masyarakat dapat meningkat.

Dukungan LPM dalam menciptakan kreativitas dan inovasi, LPM juga berperan dalam menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. LPM memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, pelatihan, akses modal, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan. Dukungan ini bertujuan untuk memperluas wawasan masyarakat dan memberikan mereka alat yang diperlukan untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Dengan menyediakan fasilitas dan pelatihan, LPM berusaha mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam setiap aktivitas yang mereka jalani, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. Namun demikian, dukungan yang diberikan oleh LPM masih terbatas, terutama dalam menciptakan ruang yang lebih luas bagi kreativitas masyarakat. Beberapa pihak mengusulkan agar dukungan yang diberikan oleh LPM lebih konkret, berkelanjutan, dan ada tindak lanjut yang memastikan ide-ide inovatif dari masyarakat dapat berkembang. Dukungan yang lebih nyata dalam bentuk fasilitas yang memadai dan akses ke sumber daya yang lebih mudah dapat membantu mempercepat proses ini. LPM perlu berperan aktif dalam membangun ekosistem yang mendukung inovasi, bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak yang aktif dalam mewujudkan ide-ide masyarakat.

Dukungan dan motivasi yang diberikan oleh LPM telah membawa beberapa perubahan positif dalam masyarakat, meskipun dampaknya belum merata atau maksimal. Ada peningkatan dalam partisipasi masyarakat,

kemandirian ekonomi, dan pola pikir yang lebih proaktif dalam pembangunan. Perubahan ini, meskipun positif, belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masih terbilang rendah, terutama di kalangan sebagian warga yang merasa belum sepenuhnya terjangkau atau termotivasi oleh program yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari LPM untuk memperkuat dukungan dan motivasi yang diberikan, agar perubahan yang diinginkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi oleh LPM dalam menjalankan peran sebagai motivator adalah kurangnya pendekatan yang menarik dan efektif untuk seluruh lapisan masyarakat. Beberapa pihak mengusulkan agar LPM lebih aktif turun langsung ke masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang lebih inovatif, kreatif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan yang lebih langsung dan bersifat personal dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan mendorong semangat masyarakat untuk lebih terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.

Setelah pelatihan dan pendampingan yang diberikan, LPM masih perlu memastikan adanya tindak lanjut yang berkelanjutan. Hal ini penting agar dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat. Tindak lanjut yang lebih intensif dan konsisten akan memperkuat dampak positif dari kegiatan pemberdayaan dan memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, LPM di Desa Long Berini belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai motivator dalam pemberdayaan masyarakat, seperti kurangnya dukungan untuk pelatihan, pendampingan, dan fasilitas. Tantangan utama yang perlu diatasi adalah kurangnya pendekatan yang menarik dan efektif untuk masyarakat serta perlunya tindak lanjut yang lebih berkelanjutan. Agar kreativitas dan partisipasi masyarakat terus berkembang, LPM perlu meningkatkan pendekatan motivasi yang lebih inovatif dan memastikan bahwa dukungan yang diberikan bersifat berkelanjutan dan lebih konkret. Seperti kegiatan pelatihan pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan dengan dukungan dan pendekatan yang menarik dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan tersebut untuk meningkatkan ekonomi lokal.

4.3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini terdapat dua jenis faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Istilah tersebut adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan. Faktor pendukung merupakan semua faktor yang sifatnya mendorong, menyokong, menunjang, membantu, dan mempercepat terjadinya sesuatu. Sedangkan faktor penghambat ialah semua jenis faktor yang sifatnya dapat mempengaruhi atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

4.3.2.1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang memfasilitasi perilaku individual atau kelompok termasuk keterampilan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan sumber daya. Maka berdasarkan penyajian data hasil penelitian ini, adapun faktor pendukung studi tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini antara lain:

1. Partisipasi Aktif Masyarakat, salah satu faktor penting yang disoroti adalah partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi ini menjadi elemen utama yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan. Tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat, berbagai program pemberdayaan yang dijalankan oleh LPM tidak akan dapat berjalan dengan maksimal, semakin besar keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, maka akan semakin baik hasil yang dicapai. Masyarakat yang aktif akan merasa lebih memiliki program tersebut, sehingga program pemberdayaan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, dukungan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung kelancaran kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LPM, kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan. Dukungan ini dapat berupa penyediaan dana, fasilitas, dan kebijakan yang

memadai yang memungkinkan LPM untuk menjalankan program-program pemberdayaan dengan lebih optimal.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia dalam LPM, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang mendukung peran lembaga ini dalam pemberdayaan masyarakat bahwa sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki dedikasi tinggi akan mempermudah pengelolaan program serta komunikasi antara LPM dan masyarakat. Dengan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengetahuan, LPM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dalam menggerakkan masyarakat dan mengelola berbagai kegiatan pemberdayaan.
4. Kerja Sama dan Jaringan yang Kuat, kerja sama yang baik antara LPM dan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga lain, turut memperkuat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Jaringan yang kuat dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak ini memungkinkan kegiatan pemberdayaan dapat terlaksana dengan lebih baik. Kolaborasi ini penting agar sumber daya dan ide-ide dari berbagai pihak bisa diintegrasikan untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih luas.
5. Adat dan Budaya Gotong Royong, faktor budaya juga tidak kalah penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Budaya gotong royong dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya sangat berperan dalam memperkuat solidaritas antar warga. Budaya ini mendorong masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yang pada

akhirnya dapat mempercepat proses pemberdayaan, nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kegiatan pemberdayaan, di mana masyarakat saling mendukung satu sama lain.

6. Inovasi dan Kreativitas dalam Pemberdayaan, inovasi dan kreativitas dalam program pemberdayaan menjadi faktor penentu dalam pengembangan potensi lokal. Pentingnya mengembangkan inovasi dalam kegiatan pemberdayaan agar program-program yang dijalankan tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi dapat membuka peluang baru bagi masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih kreatif, program pemberdayaan dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

4.3.2.2. Faktor Penghambat

Faktor pendukung yang memfasilitasi perilaku individual atau kelompok termasuk keterampilan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan sumber daya. Maka berdasarkan penyajian data hasil penelitian ini, adapun faktor pendukung studi tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya, salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga, maupun sarana prasarana. Keterbatasan ini menjadi kendala yang signifikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Anggaran yang terbatas membatasi ruang gerak LPM untuk melaksanakan program yang lebih besar dan lebih menyeluruh. Selain itu, kurangnya tenaga atau SDM yang memadai, serta

sarana prasarana yang belum optimal, menghambat efektivitas kegiatan pemberdayaan yang dijalankan oleh LPM.

2. Koordinasi yang Kurang Efektif, faktor penghambat lainnya adalah koordinasi yang kurang efektif antara LPM dengan masyarakat dan pemerintah desa. Koordinasi yang kurang baik sering menghambat kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan. Tanpa adanya komunikasi yang lancar dan hubungan yang solid antara LPM, masyarakat, dan pemerintah desa, program yang dijalankan menjadi kurang terkoordinasi, bahkan bisa terjadi tumpang tindih atau program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
3. Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas Anggota LPM, kurangnya pemahaman dan kapasitas anggota LPM dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai faktor penghambat. Meskipun LPM memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi jika anggota LPM tidak memiliki pengetahuan yang memadai atau keterampilan yang cukup dalam mengelola program, maka program tersebut cenderung tidak akan efektif. Selain itu, jika anggota LPM kurang memahami peran dan tugas mereka, maka ini dapat mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan mempengaruhi hasil yang ingin dicapai.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan mengenai Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal tersebut ditunjukkan pada kurangnya kapasitas LPM, kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta kegiatan pemberdayaan yang tidak sesuai dengan prioritas masyarakat. Maka dapat disimpulkan sebagaimana fokus penelitian sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai dinamisator adalah mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat. LPM harus berada di tengah masyarakat, melakukan pendampingan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi untuk memastikan keberhasilan program pemberdayaan.
2. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator adalah memfasilitasi aktivitas masyarakat dalam bidang pembangunan, serta mendampingi melalui sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan keterampilan agar program pemberdayaan berjalan efektif dan efisien.
3. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mediator adalah mensosialisasikan hasil usulan pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat, untuk memastikan keterlibatan, partisipasi, dan keberhasilan program pemberdayaan tersebut.

4. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai motivator adalah mendorong masyarakat desa untuk meningkatkan kreativitas dan mewujudkan kesejahteraan. LPM bertindak sebagai pemimpin dan pelopor pembangunan, dengan tantangan menciptakan motivator pemberdayaan yang mampu menggerakkan, mengajak, dan memfasilitasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Faktor pendukung dan faktor penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung keberhasilan peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini meliputi partisipasi aktif masyarakat, dukungan dari pemerintah desa dan daerah, kualitas sumber daya manusia, kerja sama dan jaringan yang kuat, ketersediaan dana dan sarana prasarana, budaya gotong royong, serta inovasi dan kreativitas dalam program pemberdayaan. Sinergi antara semua elemen ini sangat penting untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong tercapainya kesejahteraan yang lebih merata.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi yang kurang

efektif, kurangnya pemahaman dan kapasitas anggota LPM serta sumber daya manusia yang terbatas. Hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan, sehingga perlu upaya untuk memperbaikinya agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih maksimal dan mencapai hasil yang diinginkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti terkait dengan Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan masyarakat Di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, maka beberapa saran dapat diberikan peneliti guna meningkatkan efektivitas LPM dalam menjalankan fungsinya dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat desa. Saran-saran ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pihak yang berkepentingan, maupun peneliti dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia LPM

Untuk meningkatkan efektivitas peran LPM sebagai dinamisor, fasilitator, motivator, dan mediator, sangat penting untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota LPM. Pelatihan yang fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, manajerial, dan pengelolaan sumber daya dapat membantu anggota LPM untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga akan membantu

anggota LPM untuk lebih memahami dinamika yang ada di masyarakat dan meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta konflik yang mungkin timbul.

2. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Pemerintah Desa

Koordinasi yang lebih intensif antara LPM dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dapat mendukung LPM dengan menyediakan sumber daya yang lebih memadai, baik dalam bentuk anggaran, fasilitas, maupun akses kepada informasi. Sinergi yang lebih erat akan memperlancar komunikasi antara LPM dan masyarakat, serta memastikan program-program yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

3. Pendekatan Sosialisasi yang Lebih Inklusif dan Partisipatif

Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, LPM perlu memperbaiki metode sosialisasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi, penyuluhan, serta sosialisasi yang lebih interaktif dan berbasis pada umpan balik dari masyarakat akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan.

4. Menyusun Program Berdasarkan Prioritas Masyarakat

Keberhasilan program merupakan salah satu tujuan utama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, untuk mendapatkan program pemberdayaan

tepat sasaran LPM perlu melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat serta melakukan musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk membuat kesepakatan dari aspirasi masyarakat berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat setempat.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini akan semakin optimal, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan dengan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, saran-saran ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih terfokus dan berbasis pada kebutuhan serta potensi lokal. Bagi peneliti, saran-saran ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut dalam rangka menggali lebih dalam peran LPM dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- ABU HURAERAH, 2008, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*, Penerbit Humaniora, Bandung.
- AFIFUDDIN, 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan* Penerbit Alfabeta, Bandung.
- AMIN SUPRIHANTINI, 2007, *Pemerintah Desa dan Kelurahan, Cempaka Putih*, Jakarta.
- BURHAN BUNGIN M, 2010, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- DJAM'AN SATORI dan AAN KOMARIAH, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- FENTI HIKMAWATI, 2019, *Metodologi Penelitian*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- HARBANI PASALONG, 2020, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Cetak Ke 4, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- HARIWIJAYA, 2018, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Desentrasi*, Penerbit Parama Ilmu, Yogyakarta.
- IBRAHIM, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- I MADE LAUT METRA, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penetapan dan Riset Nyata*, Penerbit Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- IRWANDY, 2013, *Metode Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemuda*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta Barat.
- ISBANDI RUKMINTO ADI, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari pemikiran menuju penrapan*, Penerbit FISIP UIPress, Depok.
- KESSA WAHYUDIN, (2015), *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 67, CV Media Sains Indonesia, Jakarta.
- KOENTJARANINGRAT, 2011, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

LEXY J. MOLEONG, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Karya Rosada, Bandung.

_____, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Rosdakarya, Bandung.

_____, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Rosdakarya, Bandung.

_____, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit, PT Rosdakarya, Bandung.

MARDIKANTO TOTOK, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

RACHMAT TRIJONO, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Papan Sinarti, Jakarta.

RAHARDJO ADISASMITA, 2006, *Membangun Desa Partisipati: Pembangunan Pedesaan dan Perkantoran*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

SOERJONO SOEKANTO, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

SOERJONO SOEKANTO, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, PT Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.

SUGIYONO, 2013, *Metode penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

_____, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitas, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2015, *Metode Penelitian Manajemen*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

_____, 2018, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

_____, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

DOKUMEN :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014
Tentang Desa.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMO 43 TAHUN
2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.*

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN
2015 *Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.*

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 4 TAHUN 2015
Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Long Berini Kecamatan bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara :

Fokus Penelitian :

1. Peran Sebagai Dinamisator
2. Peran Sebagai Fasilitator
3. Peran sebagai Mediator
4. Peran Sebagai Motivator

A. Daftar Pertanyaan Untuk *Key Informant* (Kepala Desa Long Berini)

1. Peran Sebagai Dinamisator
 - a. Menurut Bapak apakah anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat hadir dalam setiap rapat kegiatan pemberdayaan yang diadakan ?
 - b. Menurut Bapak bagaimana koordinasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan ?
 - c. Menurut Bapak apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai penggerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ?
2. Peran Sebagai Fasilitator
 - a. Menurut Bapak apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjalankan perannya sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan ?

- b. Menurut Bapak bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut ?
 - c. Menurut Bapak apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan sudah sesuai ?
3. Peran Sebagai Mediator
- a. Menurut Bapak bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan ?
 - b. Menurut Bapak apakah ada pertemuan yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil kegiatan pemberdayaan yang sudah dilaksanakan ?
 - c. Menurut Bapak apa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian masalah atau konflik antar masyarakat yang terjadi ?
4. Peran Sebagai Motivator
- a. Menurut Bapak apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai motivator bagi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan ?
 - b. Menurut Bapak bagaimana bentuk dukungan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai motivator untuk menciptakan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ?

- c. Menurut Bapak apakah ada perubahan atau dorongan terhadap masyarakat dari dukungan dan motivasi yang diberikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ?

B. Daftar Pertanyaan Untuk *Informant*

1. Peran Sebagai Dinamisor
 - a. Menurut Bapak/Ibu apakah anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat hadir dalam setiap rapat kegiatan pemberdayaan yang diadakan ?
 - b. Menurut Bapak/ibu bagaimana koordinasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ?
 - c. Menurut Bapak/Ibu apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai penggerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ?
2. Peran Sebagai Fasilitator
 - a. Menurut Bapak/Ibu apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan ?
 - b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut ?
 - c. Menurut Bapak/Ibu apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan sudah sesuai ?

3. Peran Sebagai Mediator

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan ?
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pertemuan yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil kegiatan pemberdayaan yang sudah dilaksanakan ?
- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian masalah atau konflik antar masyarakat yang terjadi ?

4. Peran Sebagai Motivator

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai motivator bagi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan ?
- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk dukungan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai motivator untuk menciptakan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ?
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah ada perubahan atau dorongan terhadap Bapak/Ibu dari dukungan dan motivasi yang diberikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ?

Lampiran 1: Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi I.

	UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK
SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986 SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022	
Samarinda, 24 Desember 2024	
Nomor : 491/UWGM-FISIP/AK/XII/2024 Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Persetujuan Judul Skripsi	
Kepada Yth. : Bapak M. Habibi, S.Sos., M. Kesos Dosen FISIP UWGM Samarinda Di- Tempat	
Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :	
Nama : Septeanust Usat Lasau NPM : 2063201079 Program Studi : Administrasi Publik	
Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :	
1. M. Habibi, S.Sos., M. Kesos 2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si	(Sebagai Pembimbing I) (Sebagai Pembimbing II)
untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :	
"Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara"	
Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.	
Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.	
Ka. Prodi Administrasi Publik,  Ahmad Yani, S.Sos., M.Si NIK 2020.087.279	
Telp : (0541)4121117 Fax : (0541)736572 Email : uwigama@uwgm.ac.id Website : uwgm.ac.id	Kampus Inspirasi Kampus Berjuta Prestasi!
Kampus Biru UWGM Rektorat – Gedung B Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08 Samarinda 75119	

Lampiran 2: Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi II.

	UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK	
SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986 SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022		
Samarinda, 24 Desember 2024		
Nomor : 491/UWGM-FISIP/AK/XII/2024 Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Persetujuan Judul Skripsi		
Kepada Yth. : Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si Dosen FISIP UWGM Samarinda Di- Tempat		
Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :		
Nama	: Septeanust Usat Lasau	
NPM	: 2063201079	
Program Studi	: Administrasi Publik	
Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :		
1. M. Habibi, S.Sos., M. Kesos	(Sebagai Pembimbing I)	
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si	(Sebagai Pembimbing II)	
untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :		
"Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara"		
Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.		
Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.		
Ka. Prodi Administrasi Publik,		
 Ahmad Yani, S.Sos., M.Si NIK.2020-087.279		
Telp : (0541) 4121117 Fax : (0541) 736572 Email : uwgama@uwgm.ac.id Website : uwgm.ac.id	Kampus Inspirasi Kampus Berjuta Prestasi	Kampus Biru UWGM Rektorat – Gedung B Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08 Samarinda 75119

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.

 **PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**
KECAMATAN BAHAU HULU
DESA LONG BERINI
Alamat : Jalan PU Berini Seberang

Nomor : 34/DLB/1/2025
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan dibawah ini, Kepala Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau. Dengan ini Memberikan Ijin Kepada :

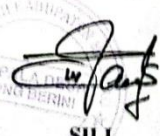
Nama : Septeanust Usat Lasau
Program Studi : Administrasi Publik

Agar Dapat melakukan Penelitian di Desa Long Berini, untuk keperluan penulisan karya ilmiah berupa SKRIPSI, dengan Judul :

" STUDI TENTANG PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKT (LPM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LONG BERINI KECAMATAN BAHAU HULU KABUPATEN MALINAU KALIMANTAN UTARA".

Demikian Surat ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, Terima kasih

Long Berini, 30 Januari 2025
Kepala Desa Long Berini



SILI

Lampiran 4: Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I.



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septeanust Usat Lasau
 NPM : 2063201079
 Program Studi : Administrasi Publik
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. M. Habibi, S.Sos., M.Kesos
 2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :

Studi Tentang Peran Lembaga Peran Lembaga pemberdayaan
 Masyarakat (Lpm) Dalam pemberdayaan Masyarakat Di Desa
 Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan
 Utara
 Dosen Pembimbing (I / II)

M. Habibi, S.Sos., M.Kesos

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	29/10 2024	Acc judul		
	7/11 2024	Lanjut Proposal (1-3) Daftar pustaka		
	11/12 2024	Publikasi semi per- nyataan, publikasi, Daftar pustaka		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	19/12 2024	Prinsip OK Lanjutan dari Pabody II		
	03/01 2025	Ace pabody bany, dy pabody 2 Bany pabody wamen		
	10/01 2025	① Ace pabody wamen Nan yg di wlu / dtk. adik pabody LPR. ② Ljnt pabody 2		
	10/01 2025	Ace pabody bany		
	27/03 2025	1. Pabody : Cate dnu 2. Cate dnu bab IV Cate bab IV dy - pabody 2. Cate Cate pabody II		
	10/04 2025	Pabody asfektu secu. Tjnt pabody 4 folio.		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	14/04 2025	Perbaikan listrik dan tjir 4 folio.		
	16/04 2025	Acc Survei Hasil dgn pmtjir p. 2		
	02/06 2025	Acc pendadaran		

Lampiran 5: Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II.



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septeanust Usat Lasau
 NPM : 2063201079
 Program Studi : Administrasi Publik
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. M. Habibi, S.Sos., M.Kesos
 2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :

Studi tentang peran Lembaga pemberdayaan masyarakat (Lpm)
 Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Long Berini Kecamatan
 Matan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara

Dosen Pembimbing (I / II)

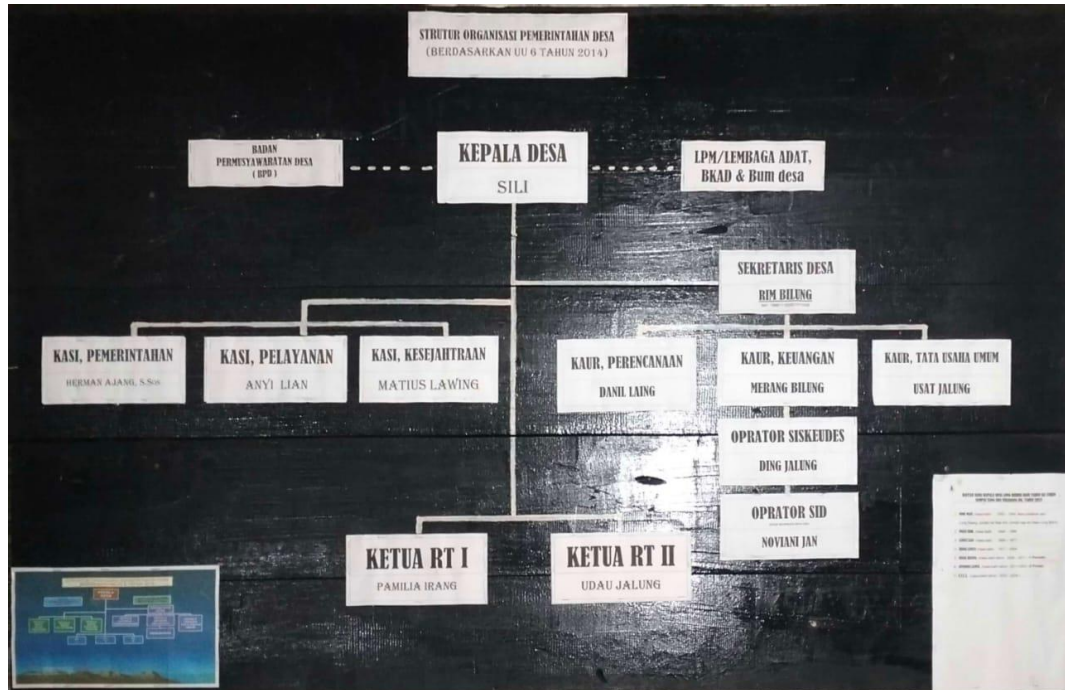
Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	11/12 2024	Ace Judul Lengkap Baku I II dan III 1 poin poin Perbaikan Skripsi		
	19/12 2024	Margine 4-4-3-3, Latar Belakang, Tujuan Penelitian Kesimpulan, Bab II, Definisi Konseptual.		
	03/01 2025	Halaman cover, Daftar isi, tabel, Gambar, Riwayat Hidup, Paragraf diperhatikan, Prolog, Kesimpulan teori, Daftar Pustaka, Bahasa asing garis miring, Definisi konseptual / Pedoman Wawancara		

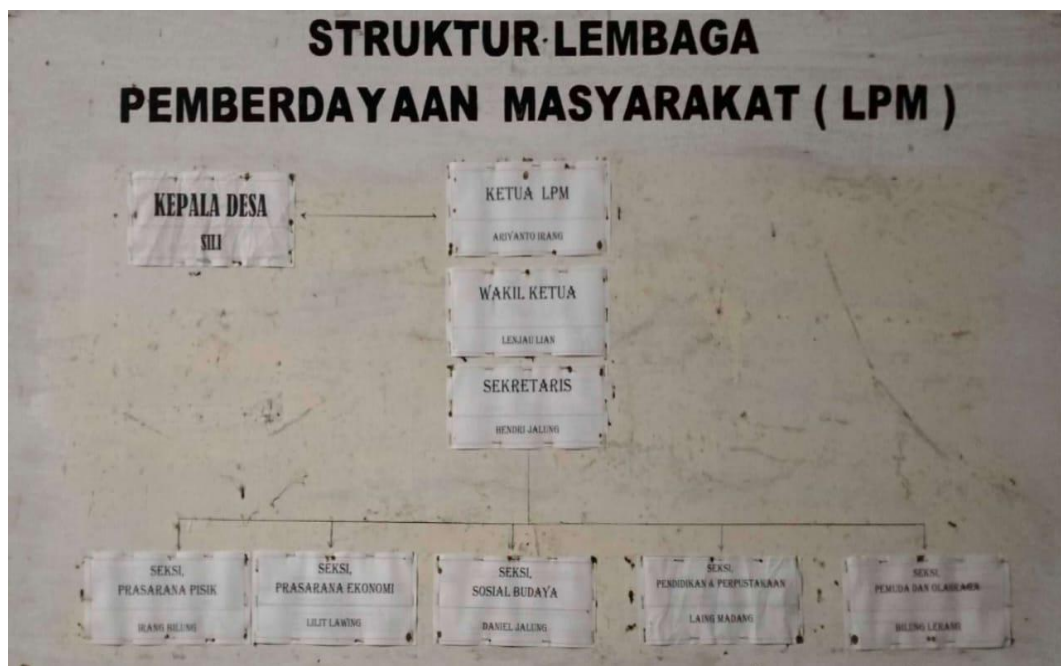
No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	10/01 2025	Pengertian dinamisator, fasilitator, Motivator, Mediator, Daftar isi/Pustaka		
	14/01 2025	Pembinan Wawancara dan Daftar Pustaka		
	14/01 2025	Pcc Penelitian Lapangan		
	08/04 2025	Plagiat, Dokumentasi penelitian, pembon dan BAB II.		
	16/04 2025	Pembahasan Wawancara dan Aspek IV dan V		
	17/04 2025	Pcc Seminar		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	19/05 2025	Ringkasan: Daftar Pustaka, Saran dan pembahasan (Hasil).		
	01/06 2025	Acc presentasi Panduan		

Struktur Pemerintahan Desa Long Berini 2025 (Sumber : Kantor Desa Long Berini 2025).



Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Long Berini 2025 (Sumber : Kantor Desa Long Berini 2025).



Gamabar 1. Wawancara dengan *Key Informant* Bapak Sili selaku Kepala Desa Long Berini (Sumber : Dokumentasi 10 Februari 2025).



Gamabar 2. Wawancara dengan *Informant* Bapak Ariyanto Irang selaku Sekretaris Desa Long Berini (Sumber : Dokumentasi 10 Februari 2025).



Gambar 3. Wawancara dengan *Informant* Bapak Lenjau Lian selaku Sekretaris LPM Desa Long Berini (Sumber : Dokumentasi 10 Februari 2025).



Gambar 4. Wawancara dengan *Informant* Ibu Agustiarti Lian selaku Ketua PKK Desa Long Berini (Sumber : Dokumentasi 11 Februari 2025).



Gamabar 5. Wawancara dengan *Informant* Bapak Hendri Jalung selaku Ketua Karang Taruna Desa Long Berini (Sumber : Dokumentasi 11 Februari 2025).



Gambar 6. Wawancara dengan *Informant* Bapak Daniel Jalung selaku Kaur Pembangunan Desa Long Berini (Sumber : Dokumentasi 11 Februari 2025).



Gambar 7. Wawancara dengan *Informant* Bapak Pamilia Irang selaku Ketua RT 1 Desa Long Berini (Sumber : Dokumentasi 12 Februari 2025).



Gambar 8. Wawancara dengan *Informant* Bapak Uda Jalung selaku Ketua RT 2 Desa Long Berini (Sumber : Dokumentasi 12 Februari 2025).



Gambar 9. Wawancara dengan *Informant* Ibu Ula Lawing selaku Masyarakat Desa Long Berini (Sumber : Dokumentasi 12 Februari 2025).

